UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Profesor

Kebebasan Akademik dan Resiliensi Otoritarianisme di Indonesia

Prof. Dr.rer.soc. Masduki, S.Ag., M.Si.

Profesor Bidang Ilmu Media dan Jurnalisme
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

19 Zulhijah 1445/25 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية الإندونيسية

Pidato Pengukuhan Profesor

KEBEBASAN AKADEMIK DAN RESILIENSI OTORITARIANISME DI INDONESIA

Prof. Dr.rer.soc. Masduki, S.Ag., M.Si.
Profesor Bidang Ilmu Media dan Jurnalisme
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

19 Zulhijah 1445/25 Juni 2024

Yang saya hormati:

1. Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
2. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia;
3. Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia;
4. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Jajaran Pimpinan Fakultas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
6. Para Dosen di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia;
8. Ibu/Bapak Para Undangan kehormatan dari beragam profesi dan lintas sektor;
9. Rekan Jurnalis dari berbagai media, dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hasbunallaahu wa ni'mal wakiil. Ni'mal maula wani'mannasiir. Alhamdulillaahi bini'matihi tatimmussaalihah. Salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenankan saya mengajak hadirin sekalian yang terhormat untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di Sidang Terbuka Senat UII dalam rangka acara pengukuhan jabatan saya sebagai Profesor Kajian Media dan Jurnalisme pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam

Indonesia. Saya sangat gembira dan bersyukur bahwa hari ini telah mendapat kesempatan membacakan pidato pengukuhan di hadapan sidang yang mulia ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tiada terkira atas kebaikan hadirin yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan Rektor UII pada hari ini.
Adapun pidato pengukuhan ini saya beri judul:

Kebebasan Akademik dan Resiliensi Otoritarianisme di Indonesia.

Hadirin yang saya muliakan,

Sepanjang dua dekade terakhir, di Indonesia muncul beragam pertanyaan ontologis seperti: mengapa perguruan tinggi negeri dan swasta absen dalam advokasi berbagai kasus pelanggaran HAM? Siapa sejatinya para akademisi? Apa makna perguruan tinggi dalam kehidupan sosial? Mengapa perguruan tinggi justru menjadi 'menara gading' *(ivory tower),* tercerabut dari nurani, narasi dan kerja-kerja kepublikan yang menjadi orientasi utama keberadaannya sebagai lembaga sosial? Pertanyaan ini mengemuka ketika dua kasus terkait proyek strategis nasional sedang *trending* tahun 2023: upaya pengambilan paksa lahan warga untuk tambang andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo dan upaya penggusuran pemukiman warga Rempang, di Batam untuk proyek pabrik kaca. Pertanyaan serupa muncul ketika begitu langkanya akademisi yang berani menyuarakan kritik atas praktik politik dinasti dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden-Wakil Presiden tahun 2024 dan kemunduran demokrasi Indonesia. Ada banyak jawaban atas pertanyaan ini. Misalnya, Hoffman (2016) dan Schulze-Cleven, dkk. (2017), menyebut akademisi mengalami

losing relevance in society karena dipicu dua hal: semakin menguatnya kapitalisasi, marketisasi ilmu pengetahuan *(knowledge economies)* sebagai kebijakan yang dominan di satu sisi dan neo-feodalisasi di tubuh kampus: elit universitas mendekati struktur kekuasaan pemegang kendali sumber daya politik ekonomi di sisi lain dan mereduksi kritisisme. Mengapa ini bisa terjadi?

Di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa para akademisi aktif merespons krisis politik berkepanjangan dan praktik genosida oleh militer Israel terhadap warga Palestina. Mereka menyuarakan protes keras atas nama pelanggaran HAM dengan risiko ruang gerak yang dihambat. Laporan berjudul: *Academic Freedom, Palestine and the Criticism of Israel* (Landy, dkk. 2020) menggambarkan dengan baik situasi akademisi yang meski mengalami ancaman ketidakpastian kerja *(precarious work),* pendisiplinan, tetap menyuarakan protes atas apa yang mereka sebut kolonialisme Israel. Di Indonesia, situasinya sedikit berbeda. Mayoritas akademisi di Indonesia tampak tersandera oleh apa yang disebut Ariel Heryanto (Kompas, 10 Juni 2024) sebagai patron dan abdi negara dengan setumpuk tugas administratif. Pusat perdebatan terkait kebebasan akademik masih berkutat pada isu *academic misconduct*, belum masuk isu yang lebih substantif dan menyangkut 'hajat hidup' kemanusiaan universal. Lihat misalnya laporan majalah Tempo, 28 April 2024 bertajuk: Artikel Lancung Para Guru Besar. Sebelumnya 1 Februari 2021, majalah ini juga menyajikan laporan serupa berjudul: Wajah Kusam Kampus. Media nasional lain seperti Kompas tahun ini menyajikan puluhan artikel yang mengulas pelanggaran etika akademik. Mengapa?

Naskah pidato ini mencoba menguraikan, mencari jawaban atas penyebab situasi di atas dari lensa struktural dengan meramu beberapa artikel ilmiah yang pernah saya tulis pada jurnal nasional dan internasional serta kanal berita platform digital Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Saya membaginya dalam tiga klaster: (1) diskursus kebebasan akademik, (2) fenomena resiliensi otoritarianisme di tubuh perguruan tinggi dan akademisi, dan (3) upaya pencarian 'jalan keluar' bagi tata kelola universitas. Pada pidato ini saya mengambil disiplin Ilmu Komunikasi, *core academic* saya sebagai studi kasus. Pidato ini tentu saja merupakan sebuah otokritik bagi saya sendiri yang 'berada di dalamnya'.

Artikel berjudul: *Educated Acquiescence: how academia sustains authoritarianism in China* (Perry, 2019) memotret konflik antara harapan ideal bahwa kaum intelegensia dan perguruan tinggi memberikan pencerahan, kritik berlangsungnya demokrasi liberal. Faktanya, para akademisi khususnya di Tiongkok mengalami represi sistematis, yang memaksa menjadi *cooperative academia to authoritarianism durability*, dan membangunkan 'macan tidur' otoritarianisme akademik. Lewat konsep *educated acquiescence*, Perry (2019) merinci bentuk represi struktural kepada akademisi yang tidak lagi berupa kekerasan fisik atau 'menyiksa' *(negative coercion),* tetapi koersi positif *(positive coercion),* antara lain pemberian apresiasi berupa uang, jabatan, status sosial, kepada para lulusan perguruan tinggi dengan kriteria yang telah ditentukan, antara lain bebas rekam jejak anti-pemerintah. Muncul fenomena *alienation of intellectuals* dari problematika sosial di luar kampus. Tiongkok menjadi contoh terjadinya rekayasa stabilitas *(engineering stability)* politik (Xiaojun, 2014).

Di Tiongkok, ambisi internasionalisasi perguruan tinggi *(world class university)* menjadi ruang baru represi, dikemas rezim Xi Jinping dalam jargon: *world class universities with Chinese characteristics 2014.* Dalam pencapaian ambisi ini, atas nama pengembalian investasi dana pemerintah kepada perguruan tinggi, para akademia diminta bekerja keras: berlaku sistem evaluasi, audit mutu, dan kompensasi yang membentuk struktur kontrol di bawah kendali indikator kinerja utama (IKU): *rating, rewarding achievement.* Para dosen diberi bonus besar atas publikasi, dan para mahasiswa pascasarjana diberi kewajiban publikasi sebagai alat ukur kelulusan. Semua ini memadatkan jadwal kerja dosen untuk hanya produktif berkarya di dalam kampus. Pada intinya, otoritas Tiongkok membentuk struktur hibah riset yang secara simultan memperbaiki peringkat global universitas di satu sisi dan menghambat independensi akademia di sisi lain. Definisi universitas berkelas dunia direduksi ke kuantitas publikasi dan raihan hibah riset, bukan kebebasan akademik.

Dalam satu dekade ketika platform digital makin populer, represi kepada intelektual dilakukan melalui model yang lebih halus, yaitu penetrasi, monitoring kegiatan mereka di media sosial (Yang, 2011, Roberts, 2018). Kamera *surveillance* merekam *proceedings* di kelas-kelas dan ruang belajar lain yang dapat direviu untuk menjamin kepatuhan politik (*political correctness).* Pada level manajemen perguruan tinggi, intervensi dilakukan lewat skema hibah, baik untuk kebutuhan infrastruktur maupun operasional. Otoritas menerapkan ideologisasi, pendidikan politik, pelatihan semi-militer sebagai cara depolitisasi mahasiswa. Tujuannya membentuk civitas akademika yang tunduk kepada

otoritas politik, dan berfokus mendukung agenda 'harmoni nasional' dan revolusi digital.

Para sosiolog kritis seperti Kurzman dan Owens (2002) dan Hodges (2000) sudah lama melihat penguatan tata kelola pendidikan tinggi sebagai penyelenggara *knowledge economy* yang inheren, sebagai bentuk lain depolitisasi. Inovasi dan produksi pengetahuan menjadi indikator kinerja, bukan kebebasan berpikir. Di Tiongkok, kebijakan ini merupakan kelanjutan dari relasi negara dan intelektual kampus yang resiprokal *(intellectual allegiance),* di mana kaum intelektual adalah *apparatus* pengetahuan pendukung kebijakan pembangunan negara. Investasi dana pengembangan perguruan tinggi oleh otoritas Tiongkok yang diikuti target kinerja untuk internasionalisasi adalah bentuk *soft intervention,* yang dibingkai dengan kerja sama resiprokal antara kampus dan lembaga pemerintah.

Dalam artikel berjudul: *The University in the Making of Authoritarian Turkey*, Ayca Alemdaroglu (2022) menyebut adanya kontradiksi antara harapan bahwa universitas menjadi pendukung demokrasi, terutama ketika ia berhasil melahirkan alumni sebagai kelas menengah profesional. Namun, orientasi lulusan pada pasar kerja berpola kapitalis justru mendorong suburnya 'politik otoriter', penambahan jumlah kampus dipaksakan selaras kebutuhan pasar kerja, bukan misi otonomi manusia akademis. Seperti halnya Tiongkok, di Polandia proses re-otokratisasi sistem politik ditandai aksi politisasi kampus, kontrol atas media, pembatasan kebebasan berekspresi akademisi dan kriminalisasi mereka yang kritis, sehingga berdampak pada budaya *self censorship* dalam riset. Pada artikel berjudul: *On the Academic Freedom in Times of Crisis of Liberal*

Democracy, Godłów-Legiędź (2021) menemukan dominasi misi ekonomi melalui parameterisasi dan sistem pemeringkatan kampus sebagai/menjadi rasionalitas tunggal perguruan tinggi Polandia. Modernisasi perguruan tinggi Polandia yang mengadopsi firma, korporatisasi jasa pengetahuan disertai pola pikir *short term economic and political interest* membuat kebebasan akademik terabaikan. Nah, apakah situasi serupa juga dialami akademisi di Eropa, Amerika, Asia termasuk Indonesia?

A. Diskursus Kebebasan Akademik

Hadirin yang saya muliakan,

Kebebasan akademik berakar pada peristiwa kongres Hamburg tahun 1940-an, pasca perang dunia kedua di Jerman (Marini dan Oleksiyenko, 2022) dan berubah signifikan pasca runtuhnya tembok Berlin. Kampus diharapkan menjadi komunitas yang otonom sekaligus progresif atas totalitarianisme dan fasisme Nazi di Jerman. Kebebasan akademik adalah pilar kebebasan masyarakat terpelajar atas nama keluhuran moral dan intelektual. Ia beranjak dari kritik bahwa struktur 'pasar akademik yang terbuka dan politisasi akademik' membuat kampus dan akademia teralienasi dari peran sosial. Kebebasan akademik merupakan antitesis dari model *academic capitalism* yang berkiblat penuh kepada tradisi manajerialisme perguruan tinggi di Inggris, Australia, Amerika, dan Kanada. Transformasi pendidikan di negara-negara tersebut sejalan dengan kebijakan neoliberal Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Ilmu pengetahuan berperan sebagai *production factor*, penghasil semata *intellectual property* dan kampus terjebak menjadi *space of capital accumulation*.

Dewasa ini, perdebatan seputar kebebasan akademik cenderung bervariasi. Misalnya, pendekatan kritis melihat bahwa kebebasan akademik bermakna *freely criticize, express everything, self reflect, and academia must be distant from any form of power*. Sementara itu, UNESCO mengadopsi pendekatan normatif bahwa kebebasan akademik adalah *everyone has the right of freely learn and teach, explain, disseminate science and art.* Lebih jauh, kebebasan akademik adalah bebas dari beban administrasi yang berasal dari universitas atau pemerintah dalam tata kelola riset akademik atau seminar. Jika merujuk pada John Stuart Mill dalam bukunya *On Liberty* (2001), kebebasan akademik berbasis pada *freedom of thought. Academic freedom is a necessary condition for the development of reason and progress as well as happiness of humankind*. Kebebasan akademik berkebalikan dengan represi akademik yang berupa *self censorship* dari akademisi dan pimpinan perguruan tinggi atas isi kurikulum dan pidato/ceramah dosen, pembatasan atas isu publik tertentu untuk menjadi objek riset dan diskusi karena dipersepsi sepihak memicu isu politik, atau dianggap partisan, seperti riset atas peristiwa genosida tahun 1965 di era Orde Baru.

Variasi pendekatan dalam melihat kebebasan akademik bergantung pada interpretasi atas diksi 'kebebasan' itu sendiri dan geopolitik yang melingkupi para akademisi. Perspektif kultural berpusat pada kebebasan di level produksi pengetahuan, sedang perspektif struktural akan melihat pentingnya kebebasan berekspresi akademisi di ruang publik. Namun variasi ini menyatu dalam pemahaman umum bahwa kebebasan akademik adalah konsep yang melekat pada sebuah

universitas yang bertugas melahirkan intelektual. Universitas secara ontologis dan aksiologis adalah institusi pengembangan keilmuan yang menghormati kemananusiaan. Ia merupakan kawah candradimuka bersemainya riset, publikasi, dan interaksi akademik antar mahasiswa dan dosen dalam mencari kebenaran dan memperkuat sikap kritis terhadap isu-isu publik. Pencarian akademis akan kebenaran, kemanusiaan, dan kemajuan peradaban ini dalam banyak kasus ditentukan oleh berlakunya kebebasan berpikir.

Terdapat dua level kondisi kebebasan akademik, yaitu mikro dan makro seperti diuraikan berikut ini: *A narrow definition of academic freedom limits it to the freedom of professors to teach their subjects, carry out research, and publish its results subject to professionally sanctioned limits. Over the years, academic freedom has come to include the freedom to participate in public life, and perhaps still controversially to criticize institution in which the professors work…that sustain them (Horn, 1999)*. Kesadaran bahwa universitas dan akademisi adalah sebuah ekosistem yang dipengaruhi oleh aktor eksternal di luar keduanya menjadi latar belakang perluasan makna kebebasan akademik. Pierre Bourdieu (1998) dalam buku *Homo Academicus* menggambarkan bahwa struktur kerja universitas merefleksikan struktur kekuasaan di luar dirinya yang kerap kali lebih menentukan segala proses seleksi, indoktrinasi dan produksi-diseminasi pengetahuan ke publik

Kajian dan gerakan kebebasan akademik di dunia sudah berakar sejak abad ke 18 di Eropa dan/atau kawasan Anglo Saxon, umumnya bermazhab tradisi liberalisme sosial. Kajian ini mendapat tantangan serius ketika diterapkan oleh negara-negara penganut neoliberal baru di

Afrika dan Asia sepanjang 1990-an. Terdapat perdebatan apakah kebebasan akademik berbasis individu dalam produksi pengetahuan atau institusi dalam kinerja operasional dan pengambilan keputusan kelembagaan. Lebih jauh merujuk berbagai literatur yang disarikan dalam buku pidato ini, saya mencatat dua klaster kebebasan: kebebasan substantif kampus dalam menentukan sendiri tujuan akademik, dan kebebasan dalam regenerasi kepemimpinan seperti pemilihan rektor. Dari perspektif dualisme nilai, ada *negative freedom* dari kontrol politik dan akademisi sebagai individu harus netral secara intrinsik, dan ada *positive freedom* yang berkenaan kebebasan akademis untuk mengajar dan riset.

Pendefinisian perguruan tinggi di negara pasca-otoriter seperti Turki, Hungaria, dan Indonesia cenderung 'individualistik', reduktif sebagai ruang kolektif yang homogen: bahwa ia merupakan rumah kegiatan belajar-mengajar dosen dan mahasiswa. Ada upaya netralisasi institusi dan komunitas kampus atas ruang sosial yang lebih luas. Formalisasi kampus sebagai penyelenggara pendidikan membuatnya terpisah dari narasi alternatif dan radikal. Reformasi pendidikan tinggi di Inggris menjadi contoh transformasi lembaga sosial menjadi lembaga komersial, ditandai penetrasi perusahaan global kepada perguruan tinggi melalui skema hibah riset, beasiswa, paten, dan perubahan pendanaan universitas dari negara ke pasar. Keadaan ini berkonsekuensi pada perubahan tata kelola *(governance)* perguruan tinggi (yang mengadopsi model korporasi komersial) dan konten kurikulum pembelajaran yang mengadopsi pola pikir kewirausahaan sebagai indikator baru kebebasan akademik (Giroux, 1985). Konsekuensi lain adalah perubahan hubungan kerja dosen yang makin bersifat kontraktual dengan

universitas. Pendidikan tidak lagi dilihat sebagai *public good*, tetapi semacam *job training* dan para dosen adalah *academic entrepreneur* (Donmez dan Duman, 2020).

Dalam artikel berjudul: *marketisation of academia and authoritarian governments*: *The cases of Hungary and Turkey in critical perspective* (2020), Donmez dan Duman melihat adanya hegemoni pemaknaan atas kebebasan akademik yang menganut logika tunggal dan berpola kapitalistik. Adapun logika otoritarian turut membonceng makna tunggal tersebut, yang tersimpul dari pemikiran sempit atas kebebasan akademik sebagai otonomi mengajar, riset, dan pengabdian masyarakat yang bersifat teknokratis-positivis. Studi-studi sebelumnya telah mengkritik rezim otoritarian ini yang menempatkan perguruan tinggi sebagai menara gading (*ivory tower*) di mana ia hanya menjadi pusat produksi pengetahuan yang terpisah dari relasi sosial-politik (Giroux, 1985). Kampus berjarak pada kendali *apparatus* struktural di balik ruang produksi pengetahuan yang mengarah pada penundukan.

Lebih jauh, Donmez dan Duman (2020) mencermati penguatan otoritarianisme yang hadir melekat dalam tubuh neoliberalisme dengan ditandai ketidakamanan *(insecurity)* dan *precariousness of academic labour*. Seggie dan Gokbel (2014) mencatat kebebasan akademik menjadi ruang kontestasi makna dan strategi, pasca neoliberalisasi kampus tahun 1980-an dan kembalinya otoritarianisme (2000s). Ada dua aktor eksternal yang memengaruhi: pemerintah yang menekan kampus-dosen untuk tunduk pada sentralisasi kebijakan melalui pemberlakuan berbagai aturan kepegawaian di satu sisi, perusahaan swasta yang masuk ke perguruan tinggi selaku pendiri dan penyandang dana pada sisi lain. Keduanya melakukan korporatisasi dan manajerialisasi. Kebebasan

akademik adalah terminologi universal yang melingkupi banyak aspek di perguruan tinggi: institusi (otonomi kampus), individu pengajar (riset dan berbicara atas hasilnya), pengetahuan (mengajar dan publikasi), sosial (keterlibatan kampus dengan isu-isu struktural di masyarakat). Seperti halnya lembaga pers, perguruan tinggi menyediakan dan mentransmisi ilmu pengetahuan kepada masyarakat sebagai *public good* (Marginson, 2011). Pelaksanaan mandat kampus dalam mengelola *public good* dalam kerangka sosial, ekonomi dan ruang *(sphere)* ini harus bebas dari aksi-aksi pragmatis.

Sejauh ini ada tiga perspektif yang dirujuk banyak pihak dalam mengurai definisi dan nilai-nilai kebebasan akademik, yaitu perspektif saintifik, utilitarian-pragmatis, dan perspektif publik. Perspektif saintifik maknanya otonomi akademis dalam produksi pengetahuan hingga publikasi. Perspektif utilitarian mengedepankan kebebasan universitas melaksanakan mandat melahirkan lulusan yang siap kerja dan penghormatan terhadap hak profesional (ekonomi) para akademisi. Sementara itu perspektif publik beranjak dari upaya memastikan relevansi kampus terhadap demokratisasi ilmu pengetahuan dan demokratisasi sosial politik. Dari ketiganya, perspektif publik tampak tidak populer bahkan dianggap sensitif.

Dari sudut pandang paradigmatik, ada tiga klaster pemaknaan kebebasan akademik di perguruan tinggi. Pertama, klaster pemikiran neoliberal yang menempatkan fungsi akademia sebagai produsen pengetahuan, melalui kerja pengajaran, publikasi, riset di mana relasi dosen dan kampus hingga negara adalah buruh dan pemberi kerja. Kedua, klaster pasca-otoriter, di mana kebebasan akademik diorientasikan pada fungsi saintifik yang

terpisah dari aktivisme sosial. Dosen harus berfokus mengajar dan meneliti. Mereka adalah *apparatus* negara dengan tugas menyelaraskan beragam proyek strategis ’inovasi pembangunan’.

Kedua klaster sama sama mempromosikan ’posisi netral’, netralitas kampus dan/atau akademisi terhadap konflik sosial politik yang terjadi, baik yang merupakan koersi kekuasaan secara vertikal maupun atas konflik horizontal. Klaster ketiga adalah pemikiran kebebasan akademik sebagai bagian dari/dan merupakan bentuk aktivisme untuk perubahan sosial, kebebasan berekspresi menjaga nilai-nilai demokrasi di luar dinding kampus. Menurut saya, beragam regulasi terkait kebebasan akademik di setiap negara termasuk Indonesia tampak kontradiktif di antara ketiga klaster seperti dapat diuraikan berikut ini:

Tabel 1: Variasi Makna Kebebasan Akademik

Aspek	Model Pasca-otoriter	Model Neoliberal	Model Demokratik
Indikator	Tertib laporan administrasi	Pertimbangan ekonomi: untung rugi	Nilai-nilai publik: dampak sosial
Status	Pengajar (saintifik)	Buruh pengetahuan (utilitarian)	Intelektual (publik)
Misi	Bekerja untuk menjaga *status quo*	Orientasi pada upah yang layak	Orientasi tugas pengetahuan untuk advokasi
Posisi	Otonomi formal	Otonomi kontraktual	Otonomi sosial

Orientasi	Kepatuhan pada pemerintah	Kesadaran sebagai pekerja profesional	Kesadaran keterlibatan sosial

(Sumber: Downs, 2009; Godłów-Legiędź, 2021; Marini dan Oleksiyenko, 2022 dan diolah kembali oleh penulis)

Ketiga cara pandang dalam tabel di atas terus mengalami dinamika di negara pasca-otoriter termasuk di Indonesia, baik karena dipicu faktor eksternal seperti keluarnya berbagai peraturan pemerintah terkait karier dosen yang dianggap membelenggu maupun tekanan atas aktivitas kaum intelegensia ketika menyampaikan kritik.

Di Indonesia, kebebasan akademik mendapat legitimasi dalam konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Artinya, kebebasan akademik menjadi bagian integral dari kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi. Masalahnya, UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen justru mereduksi makna ini. Pasal 8 ayat (1), UU No. 12/2012, misalnya menyatakan: "Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan." Ketiganya diposisikan sebagai sesuatu yang bersifat 'ilmiah' yang dikembangkan pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis. Regulasi ini tampak mengacu pandangan saintifik tentang kebebasan dalam mengajar, berdiskusi serta meneliti, menyebarluaskan, dan menerbitkan hasil riset. Kebebasan akademik dianggap sebatas sebagai 'modal sosial dan

kapital' bagi perguruan tinggi dalam mengelola pikiran ilmiah dan inovasi yang menjaga reputasi.

UU Pendidikan Tinggi No. 12/2012, Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika mendalami, mengembangkan iptek secara 'bertanggung jawab' melalui pelaksanaan tridarma; kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor atau dosen untuk menyatakan secara terbuka dan 'bertanggung jawab' atas sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Adapun makna otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), UU No 12/2012, merupakan otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut nilai-nilai, metodologi, dan pendekatan akademik. Memperhatikan perspektif yang murni saintifik ini, maka sangat mendesak meninjau ulang UU Pendidikan Tinggi dan berbagai aturan turunannya.

Laporan terbaru V-Dem Institute dan Insitute of Political Science Friedrich Alexander University, Erlangen Nurnberg Jerman terkait Academic Freedom Index 2024 (Kinzelbach, Lindberg dan Lott, 2024) menyebutkan hanya satu orang dari tiga orang di dunia yang hidup dalam iklim kebebasan akademik. Tahun 2024, terdapat 23 negara yang mengalami eskalasi drastis penurunan kebebasan akademis, terutama Tiongkok, Rusia, dan India. Sejak survei dilakukan tahun 1973, kondisi kebebasan akademis di dunia mengalami naik turun dan tahun 2024 kembali ke kondisi tahun 1973 menguat di mana 45,5 % kawasan dunia mengalami krisis atas kebebasan akademik. Dalam survei ini, Indonesia

berada di peringkat ‘moderate’, kebebasan akademik secara legal ada, tetapi dalam praktik belum baik. V-Dem menggunakan lima indikator yaitu: kebebasan riset dan mengajar, kebebasan diseminasi, ekspresi akademia, otonomi perguruan tinggi, dan integritas akademik.

B. Resiliensi Otoritarianisme

Hadirin yang saya muliakan,

Baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lain, khususnya di negara-negara pasca kolonial dan otoriter di Asia, dalam sepuluh tahun terakhir semarak perdebatan terkait masa depan perguruan tinggi sebagai institusi sosial, dan posisi para akademisi yang bekerja di dalamnya ketika berhadapan dengan negara, pemerintah, dan industri. Perdebatan tersimpul pada indikasi resiliensi politik otoriter yang dianggap melukai kebebasan akademik (lihat: Rangel, 2019; Sultana, 2018; Murove, 2018; Grim, 2017; Lojdova, 2016). Di Indonesia, studi terkait krisis kebebasan akademik mulai semarak, dikaitkan dengan *academic misconduct* seperti isu *paper mills,* jurnal abal-abal, pemberian gelar guru besar yang sarat pelanggaran akademik (Wiratraman, 2022; Huda, dkk. 2020; dan Wasis, 2020).

Berbagai literatur akademik dan publikasi opini populer dalam tiga dekade terakhir menegaskan terjadinya ‘resiliensi otoritarianisme’ kampus dalam pola yang berbeda dengan ketika kampus mengalami represi di era Orde Baru. Tiga hal, kebijakan liberalisasi kampus melalui alih status Perguruan Tinggi Negeri dari Satuan Kerja menjadi Badan Hukum (PTN-BH), birokratisasi kerja akademik khususnya karier dosen, akselerasi penggunaan teknologi digital (beragam aplikasi) sebagai alat monitoring kinerja. Resiliensi di sini bermakna

ketangguhan rezim politik tertentu atau *resistance to change* (Humbert dan Joseph, 2019). Rezim politik otoriter sebagai pengalaman sejarah di suatu negara pasca-otoriter seperti Indonesia, terus bertahan, beradaptasi, berkelindan dengan neoliberalisme bahkan demokrasi prosedural, bertransformasi melalui artikulasi represi baru yang lebih halus. Resiliensi ini –dalam batas tertentu—merujuk Vedi R Hadiz, menandai terjadinya rekonfigurasi kekuatan oligarki politik yang sudah tumbuh sejak era politik otoriter di Indonesia.

Ada setidaknya tiga buku yang membahas seputar liberalisasi, digitalisasi, dan efeknya terhadap kondisi toksik di lingkungan pendidikan tinggi: *Killing Thinking: The Death of the University* (Evans, 2004), *Dark Academia: How University Die* (Peter Fleming, 2021) dan *Dirty Knowledge: Academic Freedom in the Age of Neoliberalism* (Julia Schleck, 2022). Di Indonesia, aktivis Social Movement Institute, Eko Prasetyo, menulis buku: *Kampus Hari ini: Mahal, Menindas dan Kehilangan Integritas* (Intrans Publishing, 2024). Ada beberapa artikel opini bertebaran dalam tiga tahun terakhir terkait aksi petisi Guru Besar, Herlambang P. Wiratraman di Kompas (1 Maret 2021) berjudul: *Perangai Intelektual dan Kekuasaan*; Ariel Heryanto di Kompas.id berjudul: *Universitas* yang mengupas kecurigaan pemerintah kepada ilmuwan dan *Nasib Dosen* (2024), Taufiqurrahman: *Kultur Toksik di Dunia Akademik* (8 Mei 2023); Airlangga Pribadi: *Peran Intelektual Publik*. Menyusul heboh regulasi karier dosen, Sulistyowati Irianto menulis artikel: *Buruh Dosen* di Kompas dengan mengulas Peraturan Menteri Kemenpan RB No. 1/12023 tentang jabatan fungsional dosen.

Dalam tiga tahun terakhir, saya juga telah menulis beberapa artikel terkait krisis budaya akademik dan trajektori ilmiah terutama di lingkungan kajian Ilmu Komunikasi di Indonesia. Pertama, artikel ilmiah yang dimuat jurnal Komunikator, yang dikelola Jurusan Ilmu Komunikasi UMY edisi Mei 2022: *Political Economy of Communication Conference*, yang lalu diteruskan ke bentuk naskah populer yang terbit di *The Conversation* Indonesia 22 Juni 2022 berjudul *Riset: banyak konferensi akademik di Indonesia tak memenuhi standar ilmiah, sering hadirkan pejabat, sponsor komersial, hingga trip wisata*. Diskusi terkait artikel ini bergulir melalui *talk on X space*, hingga beberapa wawancara oleh *The Conversation Indonesia*. Selanjutnya, artikel saya berjudul: *The Dark Side of Communication Studies in Higher Education of Indonesia* (Jurnal Aspikom, Juli 2022). Saya juga menulis artikel di Asian Journal of Communication (2022) berjudul: *Cyber-troops, Digital Attacks and Media Freedom in Indonesia* yang menyinggung masalah ini. Adapun dua tulisan ringan berjudul: *ChatGPT dan Kedaulatan Akademik Kita; Wadas, Rempang dan Universitas 'Labirin'* (Tabloid UIINews) dan artikel di kolom Opini Kompas: *Guru Besar dan Krisis Keteladanan* 22 Desember 2023 merangkum kegelisahan, disusul artikel di harian Kedaulatan Rakyat (KR) berjudul: *Kebebasan Akademik*, 26 Februari 2024. Sebelumnya, KR memuat artikel ringan saya yang berjudul: *Musim Gugur Kebebasan Berekspresi.*

Saya juga mencatat beberapa pidato guru besar di Indonesia telah mengupas isu neoliberalisasi perguruan tinggi dan risikonya pada jati diri akademisi antara lain pidato Heru Nugroho (2012) berjudul: *Negara,*

Universitas dan Banalitas Intelektual (14 Februari 2012); pidato Rektor UIN Sunan Kalijaga Al-Makin: *Bisakah Menjadi Ilmuwan di Indonesia? Keilmuan, Birokrasi dan Globalisasi* (2018), pidato Guru Besar Ilmu Politik FISIPOL UGM, Cornelis Lay: *Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan* (6 Februari 2019). Terakhir, Munadi (2023) menulis pidato pengukuhan guru besar Universitas Islam Negeri Surakarta berjudul: *Privatisasi Perguruan tinggi negeri: antara pengingkaran kewajiban konstitusi, kebebasan akademik dan tuntutan pasar.* Mayoritas studi terdahulu berpusat pada dimensi kultural beban kerja dosen dan pelanggaran akademis, belum banyak kajian kebebasan akademik yang dikaitkan dengan sistem politik.

Dari ratusan literatur ini, maka kesimpulan awal yang bisa kita kemukakan adalah: hegemoni kerangka pikir dan tindakan yang hanya berorientasi administratif dan ekonomis (teknokratik-pragmatis) menjadi penanda sekaligus ruang bagi resiliensi otoritarianisme dunia akademis di Indonesia, suatu kelanjutan praktik serupa di era rezim otoriter, yang berbentuk kekerasan fisik-psikologis, pemecatan hingga pemenjaraan. Kasus pemecatan terhadap Arief Budiman, intelektual publik oleh otoritas Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1995 menjadi contoh nyata represi perburuhan di kampus. Sebaliknya, mobilitas vertikal ratusan akademisi ke lembaga-lembaga pemerintahan menjadi bentuk lain yang terus berlanjut sejak era Orde Baru (kelompok ekonomi-teknokrat) hingga era Presiden Joko Widodo. Keduanya memiliki tujuan yang sama: penundukan sikap kritis akademisi.

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) telah mengeluarkan Prinsip Surabaya untuk

Kebebasan Akademik yang mencantumkan wilayah kebebasan lebih holistik. Organisasi yang menghimpun para akademisi kritis lintas kampus ini tahun 2023 mencatat 11 model pelanggaran kebebasan akademik: (1) Serangan digital bagi akademisi yang kritis; (2) Teror terhadap aksi mahasiswa; (3) Kesaksian ahli dosen yang dipidana; (4) Dugaan korupsi di perguruan tinggi; (5) Protes isu Uang Kuliah Tunggal dan ancaman bagi mahasiswa (seperti aksi diam di Unhas, #UniversitasGagalMerakyat di UGM, trending Twitter terkait UKT di UNY Yogyakarta). (6) Praktik transaksi gelap dan jual beli pengaruh dalam penulisan jurnal internasional Scopus untuk isu jurnal; (7) Legitimasi kebenaran pemerintah dan penundukan ilmu, salah satunya menyerang peneliti asing; (8) Upaya penundukan akademisi untuk melegitimasi berbagai proyek strategis nasional dan konflik agraria (PSN opini dalam advokasi Wadas, Kinipan, dan Pakel); (9) Peleburan lembaga riset menjadi BRIN; (10). Budaya feodal dan kegagalan pembentukan serikat pekerja kampus; (11). Lambannya penyelesaian pelanggaran kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kasus-kasus terkait kebebasan akademik di Indonesia sangat beragam dari *positive coercion* hingga *negative coercion*. Antara lain mobilisasi vertikal para akademisi ke lembaga negara yang kemudian menggadaikan sikap kritis, dan –pada saat yang sama– merebaknya kasus kekerasan digital yang dialami para akademisi yang mengkritik pemerintah. Misalnya, akademisi yang mengkritik rencana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2018-2019, kasus yang dialami Prof. Ni'matul Huda saat menjadi narasumber diskusi soal kajian soal makar di UGM, kasus tuduhan

pencemaran nama baik atas Dr. Mahdi dari Universitas Syiah Kuala, kasus Herlambang Wiratraman pasca advokasi warga Wadas, dan teror pasca penyampaian petisi Guru Besar menjelang Pilpres 2014. Menarik diperhatikan, pendekatan aparat kepolisian kepada sejumlah Rektor perguruan tinggi di Jawa Tengah untuk membuat testimoni positif Presiden Jokowi juga merupakan kekerasan akademik.

Merespons situasi buruk dunia akademik di atas, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dan *Scholars at Risk* pernah membuat laporan resmi ke forum global Sesi 41, *United Nations Universal Periodic Review*, menyinggung beragam regulasi di Indonesia yang menghambat otonomi/kebebasan perguruan tinggi. Misalnya, adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Cipta Kerja. KIKA juga menyoroti PP No. 78/2021 yang memicu birokratisasi dan sentralisasi kontrol Jakarta atas peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta menyoroti Pemilihan Rektor yang memberi hak suara terlalu besar kepada pemerintah, yaitu 35%, krisis kebebasan berekspresi dosen dan mahasiswa secara umum, dan krisis dalam berserikat. KIKA mengusulkan revisi UU ITE dan penguatan senat universitas sebagai representasi tunggal civitas akademika.

Bagaimana kita membaca fakta-fakta yang dilaporkan oleh KIKA di atas? Dalam artikel berjudul *Authoritarian and Academic Freedom in Neoliberal Turkey*, Sevgi Dogan dan Erjola Selenica (2002) menyebut kebebasan akademik di negara pasca otoriter maupun liberal di Barat dan Timur dihadang oleh sistem politik otoritarian. Di Turki tahun 2016 ketika akademisi membuat petisi bernama *Academics for Peace* yang

meminta otoritas politik bernegosiasi dengan pemberontak Kurdistan, mereka mengalami kriminalisasi. Menggunakan dua konsep akademik populer: intelektual organik Gramsci (Ramos, 1982), teori kekuasaan dan pengetahuan Foucault (Christensen, 2023), kedua penulis menemukan krisis kebebasan akademik dalam sistem politik pasca otoriter yang mengkombinasikan sistem politik otoriter lama, neo-otoriter dan neoliberal di tengah model *electoral authoritarianism* atau disebut juga *competitive authoritarianism* (Levitsky and Way, 2002).

Merujuk beragam literatur politik, resiliensi otoritarian terjadi dalam bingkai hibrida neoliberal dan demokrasi: *electoral authoritarianism.* Neoliberalisme di sektor pendidikan tinggi bermula dari kebijakan privatisasi/semi publik berbagai universitas negeri disertai kontrol birokrasi pendidikan yang terpusat di kementerian. Proses sentralisasi, birokratisasi, dan hierarkisasi memperkuat terjadinya struktur otoriter di kampus, mengubah wajah kampus dari institusi akademik menjadi institusi administrasi. Dosen diposisikan sebagai pekerja birokrasi: melaporkan kuantitas kinerjanya, bukan kualitas. Kondisi ini kemudian membuka terjadinya bentuk represi administratif kepada dosen yang kritis pada jenjang karier mereka. Dalam situasi ini, saya sependapat dengan Dogan dan Selenica (2022) yang melihat lemahnya advokasi kebebasan akademik sebagai hak asasi manusia.

Dalam iklim organisasi yang feodalistik, maka tiga faktor: birokrasi, birokrat, dan birokratisasi cenderung menjadi penghambat kebebasan akademik. Merujuk pada konsep birokrasi Max Weber (Serpa dan Ferreira, 2019), birokrasi adalah ciri khas institusi modern yang secara

ideal menekankan tertib aturan administratif, formal, dan pelayanan yang setara. Ia berfungsi men-subordinasi kewenangan berbasis hierarki dalam pengambilan keputusan atas suatu jabatan atau tugas. Dalam struktur perguruan tinggi, birokrasi tergambar pada pola relasi kerja antara universitas, dosen, dan mahasiswa. Dalam praktik terkait pola karier dosen, kinerja riset, pengajaran, dan publikasi tidak otomatis menjadi indikator pencapaian dosen, ia harus di-'supervisi' terlebih dahulu oleh aparat birokrasi kampus secara berjenjang, kerap kali lamban karena faktor-faktor struktural non-akademis.

Pemikiran mendasar Max Weber tentang struktur birokrasi yang rasional, kompeten di atas dalam praktik di perguruan tinggi mengalami bias, menyuburkan politisasi, ketimbang saintifikasi. Birokrasi kampus berubah menjadi sarana kontrol politik, sekaligus menjadi ruang kontestasi politik kekuasaan, bukan sarana prosedural pencapaian akademis. Terdapat anomali kontrol birokrasi atas kinerja produksi pengetahuan bahwa individu atau teknologi aplikasi yang tidak kompeten justru memiliki otoritas kontrol hierarkis pengembangan karier dosen. Jika seorang dosen bersikap kritis, maka akan ada penggiringan persepsi bahwa sikap itu dianggap anti-kebijakan kampus sekaligus anti-pemerintah.

Birokratisasi kebijakan akademik diperkuat dengan sentralisasi kebijakan pendidikan tinggi di Jakarta (pemerintah) yang menyuburkan budaya paternalisme tata kelola akademik di Indonesia. Pemerintah pusat menempatkan dirinya sebagai 'bapak' dan universitas adalah 'anak' yang harus patuh. Masalah muncul ketika berlaku penyeragaman tujuan akademik. Misalnya, pemberlakukan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

(MBKM) secara *top down*, berpotensi mengabaikan peran kampus melahirkan manusia yang independen dari infiltrasi pasar dan pemerintah, karena dipicu pola penyeragaman pendekatan kegiatan dalam MBKM yang berkarakter developmentalis atau pro-industrialisasi. Proyek MBKM telah menebalkan tradisi intervensi pemerintah atas tata kelola kurikulum sebagai jantung pendidikan (Prahani, dkk. 2002).

Pendekatan birokrasi yang sentralistik memang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika pada era Orde Baru berpusat pada penentuan kompetensi, hingga pimpinan elit akademik, maka pasca 1998, birokrasi pemerintah masuk 'lebih halus' lewat pendanaan hibah dan reviu akhir atau akreditasi pendidikan tinggi atas nama merawat kualitas pendidikan itu sendiri. Ruang keterlibatan ini mendapat legitimasi karena dalam perspektif ekonomi politik, Kementerian Pendidikan adalah 'pemilik' yang menentukan hidup mati perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri. Pemerintah juga pihak yang paling memiliki sumber daya pendanaan tak terbatas, ketika kampus sulit mencari dana sendiri. Legalitas kepemilikan oleh pemerintah atas universitas ini tampak pada masih sedikitnya jumlah perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum, ketimbang berstatus satuan kerja.

Dalam riset tahun 2015-2016 terkait situasi akademik dan riset sosial di Indonesia, Rakhmani dan Siregar (2016) menemukan fenomena *insularity* dan *inbreeding.* Kontradiksi muncul ketika jumlah perguruan tinggi meningkat, pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di Asia dan pasar bebas pengetahuan, demokrasi politik, bantuan donor internasional untuk advokasi kebijakan, justru reputasi publikasi riset Indonesia dan

kapasitas Indonesia sebagai pusat peradaban pengetahuan cenderung rendah. Dana hibah riset meningkat, beasiswa studi lanjut meningkat yang dikelola LPDP, tetapi publikasi berkualitas rendah. Restrukturisasi perguruan tinggi negeri dari BLU ke BHMN terjadi, tetapi sentralisasi kebijakan dan birokratisasi layanan kampus tetap berlangsung. Mayoritas dosen adalah PNS yang status dan budaya kerjanya diukur secara administratif oleh kementerian terkait, bukan oleh komunitas akademik di kampus setempat. Struktur gaji dosen di PTN tidak diukur dari kinerja akademik, tetapi kinerja pelaporan administratifnya. Situasi *insularity* ini diperparah oleh fenomena *inbreeding*, *poor academic mobility* antar institusi kampus di dalam negeri dan antar institusi kampus Indonesia dengan lembaga serupa di luar negeri. Universitas di luar Jawa terkena penyakit keterbatasan mobilitas dalam negeri. Studi lanjut S-2 dan S-3 para akademisi mayoritas dilakukan pada universitas setempat atau paling jauh ke Jawa. Hampir 80 persen riset dilakukan di dalam dan untuk ke dalam universitas, mayoritas untuk menjawab isu taktis, teknis dan bukan untuk perbaikan kebijakan lebih orisinil. Target utama kinerja riset untuk memperbanyak perolehan dana (indikator kinerja) bukan keterlibatan akademisi dengan publik, masyarakat global, atau otoritas pengambil kebijakan.

Lebih jauh, Rakhmani dan Siregar (2016), menjelaskan reformasi tata kelola sudah berlangsung untuk merespons tuntutan pasar regional, akan tetapi birokratisasi akademik seperti pelaporan riset yang administratif menunda proses ini. Proses birokratisasi terdapat pada level makro kebijakan pendanaan riset dan penjaminan mutu hingga pola kerja individual periset,

yang mengutamakan laporan administratif, ketimbang substantif. Dominasi pegawai negeri dalam status kerja akademisi di perguruan tinggi negeri dengan kepatuhan pada UU Aparatur Sipil Negara membuat mereka berpola pikir birokrat, bukan ilmuwan. Faktor mayoritas lulusan doktor dari dalam negeri juga membuka tradisi kolaborasi akademik dalam negeri yang lebih kuat, ketimbang kinerja kerja sama akademik internasional. Kontroversi pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) awal tahun 2022 selaras dengan ancaman baru terhadap resentralisasi akademik di atas.

Dalam konteks hubungan perburuhan, saya melihat resiliensi politik otoriter dengan membonceng kebijakan neoliberalisasi kampus, masuk ke perguruan tinggi melalui hubungan kerja dosen dan kampus yang semakin berpola *precarious work*. Pola ini tidak hanya terkait kecenderungan yang makin umum: status dosen sebagai tenaga kontrak, digaji berdasarkan jumlah jam mengajar, akan tetapi 'serial perubahan' pada regulasi kepegawaian dosen negeri dan pola karier akademik seluruh dosen yang hampir setiap tahun. Dampak ikutan dari situasi ini adalah fenomena sikap dosen dan Guru Besar yang terbelah terhadap isu politik dinasti pada Pilpres 2024 untuk menjaga keamanan pekerjaan mereka.

Dari perspektif aktor, represi atas kebebasan individu akademisi dan otonomi institusi kampus dapat berasal dari segala arah kekuatan. Pertama, dari pemerintah selaku pemegang otoritas melalui kebijakan pola karier dosen, status kepegawaian dosen, hibah dan dana-dana pengembangan kampus. Perubahan kebijakan pendidikan nasional setiap menteri berganti selalu memicu kebingungan. Kedua, dari perusahaan swasta melalui kepemilikan atas kampus, pemberian beasiswa,

dan bantuan infrastruktur, termasuk penampungan para lulusan. Ketiga, dari tentara digital yang melakukan *hacking* atas sikap kritis akademisi atas isu sosial politik. Keempat, dari kepolisian (di Jawa Tengah) yang ‘memaksa’ pimpinan kampus untuk membuat petisi tandingan. Kelima, pimpinan perguruan tinggi ke dosen-mahasiswa melalui larangan diskusi, demonstrasi dan kebijakan pengetatan belajar.

Sebagai contoh, puncak Pilpres 2024 sepanjang Januari-Februari diwarnai aksi publik akademisi yang berbeda dibanding tahun 2019 dan 2014. Yaitu 'turun gunungnya’ sejumlah Guru Besar untuk *speak up*, menyampaikan petisi keprihatinan atas pelanggaran etika politik dan keadaban bernegara. Mereka tersebar sejak dari kampus UGM, UII, UMY, UPN, UAD di Yogyakarta. Fenomena Yogya ini kemudian meluas ke berbagai kota besar di Indonesia. Aksi guru besar lintas kampus ini patut diapresiasi karena memberi isyarat positif masih adanya kebebasan akademik. Masalahnya, jumlah mereka sangat kecil.

Sepanjang pelaksanaan Pilpres tahun 2024, narasi ‘ketidakberpihakan’ atau netralitas cenderung menjadi alat kontrol terhadap kritisisme dosen, bukan ruang sikap kritis. Netralitas berubah menjadi mitos, hantu yang menguasai ranah psikologis dan sosiologis dosen. Adalah sangat jarang akademisi berbicara di media dalam dimensi antropologis, *big and macro ideas*. Sebagai contoh, debat Capres-Cawapres lebih banyak dikomentari dari aspek teknis, interaksi simbolik, dramaturgi, bukan dimensi relasi kuasa hingga ideologi yang berkonflik. Akademisi di layar televisi jarang menyuguhkan artikulasi, lebih sering menyajikan deskripsi, berbicara

dengan mengacu pada *template* yang sudah diatur oleh media.

Pada intinya, ada dua ancaman yang utama bagi keberlanjutan kebebasan akademik. Pertama, ‘otoritarianisme’ melalui sentralisasi kebijakan standar akademik dan kepemimpinan perguruan. Kedua, neoliberalisasi melalui tekanan struktural untuk dosen hanya fokus mengajar, produksi, dan publikasi hasil riset. Keadaan ini diperparah oleh situasi perburuhan dosen: *precarious work, conditional work*, ketidakpastian karier dan ancaman pemecatan dari status pekerja kampus atas nama efisiensi. Kesibukan merespons dan beradaptasi atas kedua situasi ini membuat jarak pemisah antara kampus dan realitas sosial.

Dalam diskursus ekonomi politik pendidikan tinggi, kita mengenal tiga posisi dan peran perguruan tinggi pada era globalisasi. Pertama, peran sebagai agen politik pengetahuan yang merujuk pada Thomas Kuhn (1974) sebagai pengembang spesialisasi pengetahuan, yang dalam praktik mendiskriminasi dan menstigmatisasi disiplin pengetahuan tertentu atas ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya, ilmu Kedokteran lebih dianggap strategis ketimbang ilmu Pertanian, ilmu Hukum dianggap lebih relevan dibanding ilmu Statistik. Politik pengetahuan di perguruan tinggi juga berkorelasi dengan ’politisasi’ perguruan tinggi itu sendiri dalam formasi struktur elit kampus antara ilmuwan sosial dan eksakta.

Kedua, peran sebagai pusat ekonomi, unit bisnis dan inovasi kewirausahaan. Upaya konstruksi marketisasi perguruan tinggi yang selaras dengan globalisasi universitas, menuju liberalisasi, ditandai rating/pemeringkatan yang bias: mobilitas internasional dosen, publikasi berbasis matriks digital dan kolaborasi

industri. Perguruan tinggi dihadapkan kepada prinsip ’pasar terbuka’, dan negara akan mengurangi perannya, melepas tanggung jawab pendidikan tinggi kepada model pendanaan lewat mekanisme pasar: mahasiswa sebagai konsumen. Energi para akademisi dan pengambil kebijakan kampus diarahkan kepada pencapaian target jumlah mahasiswa atas nama keberlanjutan universitas sebagai ’unit bisnis’. Rektor adalah CEO dan dosen adalah akademisi plus birokrat-*marketer*.

Ketiga, peran pemberdayaan masyarakat. Dalam struktur kerja perguruan tinggi di Indonesia dikenal istilah *tridharma*. Pemberdayaan masyarakat ini masuk kategori ketiga: pengabdian masyarakat yang secara reduktif diterjemahkan sebagai *pro-developmentalism projects.* Kuliah kerja nyata, dakwah islamiyah, ceramah aplikatif, pembinaan kewirausahaan, dikonstruksi dalam panduan resmi, diakui, dan ditempatkan sebagai indikator kinerja. Peran ketiga ini sendiri tampak marginal ketimbang peran pertama dan kedua. Marginalitas peran ini diperparah dengan pola pikir pengabdian yang reduktif di atas. Kerja-kerja advokasi sosial berperspektif HAM seperti advokasi kasus Wadas dan Rempang sudah pasti akan dianggap ’aneh’, penyimpangan, dan berisiko pelanggaran norma dominan. Universitas tampak menjadi labirin: menepi, lamban (tidur), berputar-putar tanpa keluar dari kotak tradisionalnya sebagai semata pusat produksi ilmu, *suntuk* oleh riset dan publikasi.

Secara makro nasional, politik refeodalisasi tata kelola perguruan tinggi negeri (baca: kontrol oleh dan ketergantungan kepada pemerintah yang semakin tinggi) tampak terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri dalam sepuluh tahun terakhir. Perguruan tinggi negeri dan swasta dituntut fokus meningkatkan kerja produksi

pengetahuan, ’merdeka’ dalam kerangka pengembangan relevansi pasar kerja. Peran instrumental saintifik dan ’ekonomi pengetahuan’ lebih diberi ruang karena ramah terhadap kekuasaan politik. Perguruan tinggi pelan-pelan mengalami ’kematian’ sosial, karena peran ontologis sebagai agen perubahan sosial, rujukan nilai-nilai demokrasi sebuah negara hanya sekadar tempelan.

Di negara-negara transisi demokrasi di Asia termasuk Indonesia, kebebasan akademik sangat ditentukan orientasi politik penguasa. Periode Presiden Joko Widodo (2014-2024) yang mengutamakan pembangunan infrastruktur ekonomi, represi akademik cenderung tinggi agar menjaga stabilitas. Hanya saja, model represinya berbeda dengan era Orde Baru, karena memadukan represi karier individu dosen di satu sisi dan tekanan untuk marketisasi perguruan tinggi atau internasionalisasi di sisi lain. Peraturan soal jabatan fungsional dosen yang terus mengalami perubahan tanpa kendali merupakan ‘cara baru’ menciptakan iklim ketidakpastian *(precarious work)* atas profesi publik ini. Terhadap perguruan tinggi negeri, alokasi anggaran APBN tahunan yang besar untuk mencapai status terakreditasi nasional dan internasional bersifat ‘tidak gratis’, tetapi disertai tuntutan agar birokrat-akademisi membuat beragam laporan yang berpola administratif. Efek sosiologis dari praktik ini adalah ketiadaan waktu luang, keengganan hingga ketakutan individu akademisi untuk melakukan advokasi sosial atas kebijakan yang menjadi penyebab kondisi buruk mereka.

C. Potret Ilmu Komunikasi

Hadirin yang saya muliakan,

Bulan Juni tahun 2024 ini persis bertepatan dengan dua peristiwa penting dalam perjalanan akademik saya. Pertama, bulan ini tepat dua puluh tahun masa kerja sebagai dosen atau akademisi di Universitas Islam Indonesia. SK. Badan Wakaf No. 172/A-II/PH/2004 tentang pengangkatan pegawai edukatif keluar tanggal 15 Juni 2004 yang secara resmi menetapkan saya sebagai dosen di UII. Kedua, tahun 2024 ini juga bertepatan usia 20 tahun Program Studi Ilmu Komunikasi UII, rumah akademik saya sejak tahun 2004. Sebelum menjadi dosen, saya adalah jurnalis dan sejatinya jiwa saya hingga kini tetap jurnalis. Dua puluh tahun sebagai dosen, 'buruh akademik' di Jurusan Ilmu Komunikasi UII sungguh diwarnai beragam dinamika kehidupan akademik dan sosial sejak mengajar, meneliti, melakukan pengabdian masyarakat, studi lanjut doktoral di Jerman dan tetap terlibat dalam gerakan sosial advokasi kebebasan berekspresi, kebebasan pers, jurnalisme dan keberlanjutan media publik di Indonesia. Ada kesamaan antara profesi jurnalis dengan profesi akademisi, yaitu membawa misi produksi dan diseminasi pengetahuan sebagai *public good*. Kedua profesi ini ibarat dua sisi mata uang: bersentuhan langsung kepentingan publik dan saling melengkapi. Kedua profesi juga mengalami tekanan struktural yang tinggi sejak rezim Orde Baru hingga pasca-reformasi. Namun bedanya, jika jurnalisme dan para jurnalis terus berada di lapangan, memberi warna bagi demokratisasi informasi, maka dunia akademik kini justru tersandera dalam ruang gelap *(dark academia)* peradaban.

Dua puluh tahun barangkali ‘waktu yang pendek’, tetapi juga waktu yang berat dalam perjalanan mencari identitas sebagai kaum akademis, mencari jawaban atas soal mengapa Ilmu Komunikasi di Indonesia belum mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mengapa ilmu ini tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial dan justru ia hanya dipandang sebagai pendukung pembangunan dan industrialisasi. Alih-alih mitra kritis, Ilmu Komunikasi justru melakukan *adjustment* kebijakan developmentalisme yang menjadi mantra politik liberalisme dan kontrol industri digital global. Pendidikan Komunikasi bukan seperti yang digambarkan Freire (dalam Prahani dkk, 2020) sebagai pembebasan manusia Komunikasi, akan tetapi justru menjadi bagian dari politik penundukan.

Buku berjudul Komunikasi dan Kuasa (Adiprasetio, 2023) telah mengurai dengan baik sejarah panjang penundukan studi-studi komunikasi lewat kebijakan *Indologie* oleh kolonial Belanda, yang berlanjut ke pembangunanisme Orde Baru hingga digitalisasi hari ini. Soalnya, mengapa kita seperti justru tidak belajar atas situasi historis yang hegemonik ini? Perguruan tinggi di Indonesia dan di berbagai negara pasca-liberal lain semakin masuk perangkap *Toxic University, Zombie Leadership, Academic Rockstar* (Alanazi, 2018). Atau masuk kategori yang diulas Ben Sasse (2023) sebagai the *moral decline of elite universities. (lihat artikel ini:* https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/12/interesectionality-american college/676350/). Sasse menulis: *too much of academia cares little for human dignity, leaves no space for forgiveness, and exhibits no interest in shared progress*.

Dalam forum Refleksi Guru Besar Ilmu Komunikasi, di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, 31 Januari 2024, saya mengemukakan terjadinya kemunduran tradisi akademik berbasis substansi di Ilmu Komunikasi. Bahwa merujuk pada buku *How University Die* yang ditulis Peter Fleming, terdapat fenomena *dark academia* (2021) dengan dua ciri: (1) *administrativisme,* jabatan birokratis, mobilitas fisik, budaya kerja *fast-track:* percepatan publikasi dan percepatan guru besar. (2) *celebrity syndrome*: akademisi menyukai update status media sosial kegiatan teknis bukan substansi kolaborasi.

Diskursus kebebasan akademik bertalian erat dengan perkembangan Ilmu Komunikasi dan persepsi publik terhadap kedudukan Ilmu Komunikasi dalam arus besar pembangunan nasional dan diskursus akademik di tingkat global. Mengurai problematika Ilmu Komunikasi dalam pidato ini penting bukan hanya karena merupakan wilayah kajian saya, tetapi karena ia menjadi contoh terbaik stagnasi ilmu pengetahuan komunikasi sebagai residu politik otoriter atas dunia akademik sejak era kolonial, Orde Baru hingga hari ini. Bagian ini akan memakai ilmu Komunikasi sebagai studi kasus, dan akan terpusat pada pembiasan budaya konferensi ilmiah dan peningkatan kuasa teknologi digital transnasional. Uraian ini merupakan otokritik atas diri saya yang turut tak berdaya menghadapi situasi ini.

Pasca Orde Baru runtuh, terdapat dua arus besar kajian komunikasi. *Pertama,* arus positivistik-teknokratik: studi komunikasi mengikuti logika pasar memproduksi tenaga kerja dalam arus pasar yang kompetitif. Mengikuti pola ini, kinerja program studi dan kurikulum yang populer adalah pengkajian dan

pembekalan mahasiswa pada aspek praktis. Indikator kinerja program studi (prodi) diukur ketika lulusan diterima di lapangan kerja. Dari arus ini muncul gagasan muatan kurikulum yang mengakomodasi kepentingan industri atau pemerintah selaku pihak penerima lulusan. *Kedua,* arus pemikiran kritis alternatif di mana ilmu komunikasi bercorak 'oposisional' atas kuasa pasar dan agenda resmi pemerintah yang destruktif bagi pengetahuan. Luarannya adalah lulusan yang berpikir analitik atas kondisi masyarakat yang tidak setara. Muncul wacana dewesternisasi, dekolonisasi, kajian media lintas disiplin, riset-riset yang membongkar fondasi keilmuan.

Namun, arus kedua ini sangat lemah. Dari sisi pertumbuhan akademik, gerakan de-westernisasi (digagas misalnya oleh Peter Golding dan James Curran) dan dekolonisasi ilmu pengetahuan (Stuart Hall dan Gayatri Spivak) tidak populer. Diskursus kedua gerakan yang misalnya merujuk Walter Mignolo, pemikir yang dianggap "nabi" dari dekolonisasi (lihat https://criticallegalthinking.com/2012/05/02/delinking-decoloniality-dewesternization-interview-with-walter-mignolo-part-ii/) kurang mendapat respons. Situasi ini mengonfirmasi terjadinya penundukan kaum akademis pada narasi tunggal developmentalisme: bahwa Ilmu Komunikasi adalah hanya disiplin praktis, ilmu terapan, yang pada gilirannya menempatkan para alumni komunikasi sebagai '*apparatus*' industrialisasi, para dosennya sebagai intelektual tukang yang menjadi pendukung utama kebijakan, tanpa kritik.

Dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah menggunakan tiga diksi yang mengacu proyek mobilisasi internasional dosen dan perguruan

tinggi di Indonesia. Yaitu: meningkatkan jumlah publikasi dan diseminasi akademis di level internasional; kerja sama peneliti Indonesia di berbagai negara; mendorong pertemuan ilmiah internasional secara rutin di lingkungan kampus atau asosiasi ilmuwan di Indonesia. Berangkat dari kriteria ini, maka kegiatan akademik seperti konferensi harus menargetkan peserta yang berasal minimal dari lima negara berbeda, dan target publikasi artikel internasional minimal sepuluh dari peserta. Kebijakan ini merupakan bagian dari ambisi Indonesia sejak tahun 2010 untuk menempatkan perguruan tinggi dalam jajaran 500 besar dunia berdasarkan pemeringkatan oleh lembaga luar negeri seperti QS dan *Times Higher Education Supplement*.

Merujuk riset penulis tahun 2021, konferensi ilmiah menjadi ruang beragam kebijakan yang saling kontradiktif. Kebijakan akreditasi dan penjaminan mutu dari pemerintah menjadi faktor utama pemicu semaraknya forum konferensi di berbagai kota dan animo dosen atau profesional untuk hadir mengikutinya, disamping daya tarik acara non-akademis. Dengan kata lain, partisipasi peserta dan partisipasi dunia akademik selaku penyelenggara konferensi lebih didorong motivasi administratif-akademis, *government driven*. Adapun apakah kebutuhan ilmiah untuk mendialogkan hasil riset sesama kolega untuk produktivitas ilmu pengetahuan menjadi motivasi utama? Kiranya masih perlu riset lebih lanjut.

Sejumlah kebijakan yang dapat dianggap sebagai pendorong maraknya konferensi dari sisi pemerintah berada di ranah hilir berupa asesmen laporan kinerja dalam bentuk beban kinerja dosen atau BKD yang dibuat setiap semester, bukan di hulu. Kebijakan ini juga

cenderung kuantitatif, bukan kualitatif. Misalnya, kriteria keikutsertaan dalam konferensi akan menentukan nilai yang diperoleh dosen: pembicara utama atau sesi paralel (oral dan poster), publikasi hasil konferensi dalam bentuk *paper* pada jurnal yang bereputasi atau prosiding yang terindeks Scopus sebagai kinerja dosen (Lestari, 2015). Petunjuk Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen tahun 2019 mengatur presentasi dosen dalam konferensi dengan publikasi prosiding terindeks Scopus akan mendapat apresiasi kredit sebesar 30 poin, hampir setara dengan publikasi artikel di jurnal internasional. Adapun jika disajikan pada konferensi nasional dengan publikasi prosiding nasional akan bernilai 10. Jika hanya dipresentasikan dalam konferensi (tanpa publikasi), maka nilainya 5 poin. Angka ini nilainya cukup besar sebagai pemicu partisipasi para dosen.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun (setidaknya sejak tahun 2015) telah menyediakan dua skema yang mendorong semaraknya konferensi akademik: Pertama, bantuan pembiayaan pada presentasi pada konferensi internasional di luar Indonesia. Dosen yang lolos hibah ini akan mendapat bantuan biaya perjalanan, penginapan, dan biaya pendaftaran acara. Syarat laporannya adalah publikasi hasil konferensi pada prosiding atau jurnal terindeks Scopus. Kedua, bantuan penyelenggaraan konferensi berskala internasional bagi asosiasi profesi dosen atau perguruan tinggi. Dalam panduan penyusunan proposal penyelenggaraan konferensi internasional yang diterbitkan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Dirjen DIKTI tahun 2015 disebutkan, DIKTI menanggung hampir seluruh kebutuhan biaya, termasuk penghargaan makalah terbaik. Total alokasi anggaran bantuan untuk

konferensi bertaraf internasional adalah Rp150 juta. Dalam irama serupa, hampir semua perguruan tinggi menganggarkan dana rutin dan kompetitif untuk para dosennya dalam mengirim paper dan presentasi pada konferensi.

Tabel berikut ini merinci bentuk keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan konferensi akademik di Indonesia secara umum:

Tabel 2: Ekosistem Regulasi Konferensi Akademik

Produk	**Sasaran**	**Pendekatan**	**Isu Utama**	**Dampak**
Instrumen Akreditasi Program Studi	Program studi	Laporan kinerja	Reputasi institusi	Kompetisi menggelar konferensi internasional
Ketentuan Penilaian Angka Kredit	Individu dosen	Point kenaikan pangkat	Jenjang karier	Mobilitas dosen untuk mencari sertifikat
Hibah Penyelenggaraan Konferensi	Asosiasi akademis	Laporan penggunaan dana	Peningkatan mobilitas internasional	Asosiasi menjadi mitra pemerintah
Sponsorship secara tentatif	Penyelenggara acara	Sebagai pembicara atau sponsor acara tambahan: *dinner*/*gathering*	Pencitraan lembaga/individu pemerintah	Suasana non-akademik: lobi dan negosiasi kepentingan

(Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, diolah kembali)

Dalam artikel berjudul: *Komodifikasi Konferensi Akademik Komunikasi di Indonesia,* saya menulis, bahwa berdasarkan studi atas konferensi Komunikasi pada periode 2015-2021, tampak nyata adanya dualisme misi yang saling kontradiktif. *Pertama*, kepentingan idealistik menjadikan konferensi sebagai ruang akademik bagi eksaminasi hasil riset. Kepentingan ini tampak pada adanya diskusi panel dan paralel di setiap konferensi, diikuti rencana publikasi pada jurnal atau prosiding terindeks. Publikasi berupa buku panduan dan buku abstrak turut membantu diseminasi *paper* ke publik. Lebih jauh, adanya kebijakan standardisasi kompetensi dosen yang memasukkan unsur kolaborasi riset, publikasi, dan diseminasi ilmiah internasional membuat konferensi menjadi acara tahunan dosen yang bergairah. Situasi ini menggambarkan romantika akademik era Humboldtian Jerman, konferensi menjadi 'ruang intelektual' yang penuh perdebatan lintas disiplin dan negara (Karlsohn, 2016).

Kedua, kepentingan ekonomi dan politik kelembagaan dari pihak penyelenggara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan konferensi menjadi model bisnis perguruan tinggi dan asosiasi untuk menunjukkan citra diri institusi sekaligus mengakumulasi keuntungan finansial. Informan riset ini menyebutkan, akumulasi uang dari konferensi cukup besar dan setidaknya mampu mengganti ongkos pelaksanaan acara. Model pendanaan konferensi yang tidak terbatas pada biaya registrasi tampak lazim di Indonesia. Penyelenggara lebih menyukai menggandeng sponsor korporasi atau pemerintah, ketimbang mengelola iuran atau registrasi pemakalah dan pembicara. Merujuk Edelheim, dkk. (2018), konferensi dikemas agar para korporasi,

pemerintah dan akademisi berpikir sebagai "investasi sosial" yang akan dipetik hasilnya oleh para pihak, termasuk industri pariwisata. Konferensi menjadi 'anak kandung' praktik kapitalisme akademik (Jessop, 2018), pemikiran the *'knowledge-based economy'* yang menuntut pengajaran, riset, publikasi dan kolaborasi agar selaras dengan penciptaan manusia sebagai aset ekonomi digital, sistem ekonomi perburuhan yang eksploitatif, penyediaan infrastruktur komunikasi bagi akumulasi finansial.

Dalam iklim perguruan tinggi yang mengalami liberalisasi, maka seluruh aktivitas akademik dan non-akademik termasuk konferensi yang diikuti para akademisi bukan sebuah peristiwa sosial biasa. Konferensi berskala nasional dan internasional tidak hanya dipandang sebagai ruang kontestasi idealisme dan gagasan akademik. Ia menjadi indikator kemampuan manajerial hingga kemampuan akumulasi finansial bagi pihak kampus atau *organizer*. Makna konferensi berubah dari fungsi sebagai ruang publik yang konstruktif menjadi kontestasi reputasi penyelenggara. Upaya penyeragaman standar dalam konferensi dapat ditelusuri pada adanya ketentuan akreditasi perguruan tinggi yang memberi angka prestasi tertentu kepada perguruan tinggi penyelenggara konferensi berskala internasional. Lebih jauh, nilai prestasi juga diberikan kepada individu presenter/pemakalah pada konferensi berskala internasional yang dianggap bereputasi, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam perspektif ekonomi politik, konferensi dapat ditempatkan sebagai medium, ruang kontestasi institusi dan individu untuk meraih keuntungan sosial, ekonomi, dan politik. Konferensi adalah sebuah peristiwa yang

multi-kepentingan mulai dari presentasi prestasi akademik berupa karya ilmiah penelitian hingga bisnis kuliner, pariwisata atau mobilitas turistik antarnegara. Sebagai sebuah hajatan, konferensi makin memerlukan biaya yang besar. Sebagai akibatnya, sebuah konferensi akademik sangat tergantung pada dukungan finansial dari individu di luar peserta aktif atau penyelenggara seperti perusahaan swasta, pemerintah atau donatur. Independensi penyelenggaraan menjadi pertaruhan ketika konferensi dibiayai korporasi yang memiliki misi utama membangun bisnis.

Jika ditelusuri dari sisi *value chain*-nya, sebuah konferensi merupakan mata rantai bisnis yang semakin menggiurkan: sejak publikasi acara, registrasi/visitasi online, seremoni pembukaan, sesi panel besar, sesi paralel/diskusi kamar, hingga pemberian sertifikat dan penjaminan publikasi di jurnal internasional tertentu. Konferensi adalah "pesta borjuis" dengan makan siang/malam, traveling, suvenir sebagai penanda utamanya. Acara utama berupa presentasi hanya pelengkap. Di negara-negara dengan tradisi ilmu pengetahuan yang masih berkembang, seperti kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, menurut catatan Beshyah (2017), konferensi ilmiah berskala besar lazim dihadiri 1500 peserta, kerap kali berlangsung di sebuah hotel mewah. Acara konferensi bisnis disponsori industri yang terkait misalnya jika topiknya soal kesehatan/obat, maka perusahaan farmasi akan memberikan sponsor para peserta, tentu dengan imbalan peningkatan bisnis obat mereka. Peserta disebut sebagai 'profesional academia' bukan akademia/ilmuwan. Situasi serupa juga terjadi pada konferensi bertopik bisnis. Tidak hanya berlokasi di Timur Tengah, *fake conference* juga kerap kali

mengambil lokasi di Eropa Barat, seperti di Edinburg Inggris dengan *'48-hour peer review process'* (MacKenzie, 2019). Bagaimana di Indonesia? Hasil riset ini memberi sinyal awal fenomena yang mengarah kepada situasi serupa.

Universitas dan asosiasi akademik dan profesional Komunikasi dan disiplin ilmu lain secara umum harus segera duduk bersama merumuskan standar forum ilmiah yang taat pada komitmen konferensi yang profesional, tanpa campur tangan pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas keilmuan dan muatan non-akademik. Mengacu pada tradisi tahunan konferensi internasional yang digelar *International Communication Association* (ICA) dan *International Association of Media and Communication Research* (IAMCR), akademisi komunikasi di Indonesia perlu segera memiliki konferensi tunggal dengan kriteria dan seleksi akademik yang ketat. Kemampuan menghindari sponsor komersial atau pemerintah menjadi tantangan selain mengutamakan para ahli dari Indonesia sebagai pembicara. Puncaknya, perlu kesadaran kolektif akan bahaya penggunaan konferensi sebagai 'ruang publik akademik' sebagai arena penundukan, ruang nyaman kembalinya otoriterisme akademik.

D. *The Engineering Stability?*

Hadirin yang saya muliakan,

Diksi *engineering stability* diperkenalkan oleh Xiaojun (2014) ketika menggambarkan fenomena menguatnya 'manajerialisasi' perguruan tinggi di Tiongkok yang notabene otoritarian tetapi selaras dengan kebijakan neoliberalisasi. Antara lain, akselerasi 'marketisasi program akademik di semua jenjang', akreditasi internasional yang dikerjakan oleh korporasi

global, konferensi internasional dosen dalam bingkai mobilitas internasional dan merebaknya bisnis jurnal dan artikel ilmiah. Neoliberalisasi di sini merujuk pada Hadley (2015): *self interest, entrepreneurial organization offering recursive education experiences and research services for paying clients. In such institutions, academics become managed-knowledge producers who should follow prescribed sets of organizational process. Their research and pedagogic must be justified as beneficial for university through quantitative measures and students are recast in the role of knowledge consumers*. Segala fenomena ini membuat para akademisi dan birokrat kampus menjadi 'manusia administratif dan a-sosial.'

Buku berjudul *Dark Academia: How University Die* (2021) memantik diskursus masa depan akademisi dan perguruan tinggi yang terpapar korporatisasi sekaligus terpapar budaya birokratik. Penulisnya, Peter Fleming mendasarkan pengamatan pada kondisi universitas di Inggris, Amerika Serikat dan Australia. Ia menyebut munculnya *dark academia* (kegelapan kaum akademis), suatu kondisi pasar gelap dunia akademis, di mana para akademisi bekerja sebagai buruh, mengalami eksploitasi oleh korporasi, bukan individu akademis yang otonom. Sebagai contoh, budaya menulis artikel ilmiah sebagai produksi pengetahuan yang bersifat epistemologis-etis, kini tersingkir oleh budaya menulis untuk tujuan instrumental: laporan administratif, karena manajemen universitas yang mengacu *Edu-factory:* seluruh kinerja dosen ditujukan pemenuhan kebutuhan teknis, bukan ekspresi pengetahuan.

Dalam konteks Indonesia, studi Rosser (2021) menemukan tiga faktor: neoliberalisasi universitas, birokrasi universitas yang predatoris dan marginalisasi

peran universitas sebagai pusat ilmu pengetahuan. Pertama, neoliberalisasi yang ditandai orientasi pada pemeringkatan perguruan tinggi, perlombaan menjadi *the world class* yang diukur oleh beragam badan dunia. Kinerja dosen diukur dari statistik publikasi, sitasi dan peringkat yang dikerjakan korporasi global, bukan rekognisi sosial kepada masyarakat. Kedua, iklim birokrasi universitas yang feodal ala Orde Baru, mengalami politisasi struktur manajemen dan rawan praktik korupsi. Relasi yang terlampau ketat antara birokrat kampus, birokrat di kementerian pendidikan dan politisi dalam penentuan jabatan tertinggi seperti Rektor di perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) menjadi ruang nyaman praktik predatori. Pada saat yang sama, Rosser (2021) melihat masih ada idealisme dalam pemegang kebijakan dan dosen untuk menjaga relevansi universitas dengan publik, akan tetapi masih berupa wacana.

Merujuk konsep klasik *propaganda model* yang dikembangkan Herman dan Chomsky (2002), ada lima filter mengapa institusi publik seperti perguruan tinggi harus dikendalikan agar berfungsi sebagai *propagandist* untuk kelompok elit dalam struktur masyarakat kapitalis. Yaitu: (1) struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, dan orientasi keuntungan korporasi pada akumulasi kapital; (2) dominasi iklan atau kerja sama pemerintah sebagai sumber dana utama kampus; (3) ketergantungan akademisi pada informasi yang ada pada pemerintah, kalangan bisnis, dan "ahli" yang telah didanai oleh oligarki; (4) "kritik" menjadi alat mendisiplinkan dosen, dan (5) "anti-komunisme" sebagai sistem kontrol. Kelimanya berinteraksi dan saling menunjang. Dua kekuatan digdaya: politik kekuasaan dan industri

penyedia lapangan kerja lulusan yang kapitalistik menjadi filter orientasi dan tata kelola institusi pendidikan, penentu kebijakan yang mengarahkan aspek visi-misi (ideologis).

Penggunaan konsep propaganda di atas relevan dalam pidato ini terutama merujuk pada filter pertama dan kedua. Filter pertama adalah kepemilikan universitas di Indonesia yang masih berada di bawah kontrol langsung atau tergantung pada otoritas pemerintah, tidak otonom (badan publik) seperti di negara maju. Pemerintah masih menjadi regulator utama yang menguasai sektor sumber daya keuangan dan infrastruktur kampus. Kedua, orientasi pengelolaan universitas sebagai korporasi, bukan lembaga sosial. Ketergantungan pembiayaan universitas kepada iuran per-semester atau registrasi dari mahasiswa memanjakan mereka dari upaya pembiayaan internal. Filter kedua ini dapat pula memasukkan subsidi riset atau inovasi kelembagaan dari hibah kompetitif yang dikelola pemerintah.

Baik Herman dan Chomsky (2002), Fleming (2021) maupun Rosser (2021) mendasarkan argumennya pada konsep informasi atau dalam konteks ini ilmu pengetahuan sebagai *public good*, yang di negara-negara pasca otoriter masih dipandang sebagai *political good*. Di negara kapitalis, komodifikasi *public good* mengubahnya menjadi *consumer good*. Seperti lembaga media, perguruan tinggi adalah institusi korporatik yang memproduksi benda berupa pengetahuan, untuk diperjualbelikan secara kompetitif. Perbedaan antara institusi media dan universitas terletak pada birokratisasi universitas, yang tidak ditemui pada institusi media. Birokratisasi universitas adalah khas Indonesia, warisan

otoriter Orde Baru, ketika universitas adalah *apparatus* kementerian, bukan unit yang otonom.

Studi terkait korporatisasi dan birokratisasi universitas, khususnya yang fokus kepada fenomena kemandegan kajian Ilmu Komunikasi di Indonesia belum banyak dilakukan. Studi yang telah ada umumnya berpusat pada relasi kuasa universitas dengan otoritas di luar dirinya seperti pemerintah dan industri. Studi yang mengkorelasikan lebih lanjut pada relasi kuasa internal di tata kelola juga belum populer. Ini berbeda dengan kajian historis ekonomi politik orientasi studi Ilmu Komunikasi yang sudah cukup banyak. Misalnya kajian Haryanto (2001) dan Adiprasetio (2019). Gagasan soal dewesternisasi ilmu Komunikasi sudah pernah ditulis (Birowo, 2007; Rahardjo, 2009; Hair, 2020; Utari, dkk., 2012).

Berdasarkan riset ASPIKOM tahun 2022 (Masduki, 2022), ada kecenderungan utama pilihan minat, nomenklator Prodi/Jurusan dan fakultas sebagai payung besar organisasi yang menaungi studi komunikasi. Tiga kecenderungan minat studi yang dominan adalah: Ilmu Komunikasi (bersifat holistik), Jurnalistik dan ilmu Hubungan Masyarakat (Public Relations) yang lebih spesifik. Dari ketiganya, minat kajian humas mendapat pilihan posisi tertinggi, disusul kajian Komunikasi yang bersifat umum. Minat kajian di luar ketiganya yang bercorak kritis atau integratif dengan ilmu lain tampak marginal, atau hanya merupakan pengembangan minor dari ketiga kajian tersebut. Berdasarkan data ini, kritik Sudibyo (2004) bahwa kajian ekonomi politik masih absen dalam disiplin Komunikasi terkonfirmasi.

Terkait jurusan/prodi, nama paling banyak adalah Ilmu Komunikasi *(communication science)*, yang

menunjukkan kondisi keilmuan yang statis, fokus kajian yang masih makro, tidak tampak spesialisasi pengkajian. Beberapa universitas memang menawarkan program studi yang lebih mikro seperti Hubungan Masyarakat dan Jurnalistik, tetapi nomenklatur ini marginal dan hanya dapat terjadi jika Ilmu Komunikasi menjadi fakultas tersendiri, yang jumlahnya masih sedikit. Dengan kata lain, temuan riset menggambarkan korelasi organisasional, antara minat studi dengan nama atau bidang ilmu pada fakultas sebagai payung besarnya. Riset ini menemukan indikasi berkurangnya jumlah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sebagai 'rumah besar' prodi Komunikasi. Misalnya, pada Universitas Islam Negeri (UIN), fakultas sains dan humaniora menjadi organisasi yang membawahi Komunikasi. Sedangkan pada beberapa universitas negeri atau swasta di luar UIN, Prodi Ilmu Komunikasi di bawah payung beragam fakultas yang tidak terbatas ilmu sosial dan politik. Misalnya, fakultas ilmu sosial dan bisnis/ekonomi, dan fakultas hukum.

Secara historis sejak berdiri tahun 1950-an, para akademisi dan pengambil keputusan di lingkup perguruan tinggi komunikasi telah terpapar represi politik pengetahuan. Rezim otoriter Orde Baru sangat kuat mencengkeram orientasi kerja akademik, lewat jargon pembangunanisme dengan komunikasi sebagai perangkat *apparatus*-nya. Pasca rezim Soeharto jatuh tahun 1988, fenomena terbalik muncul di mana segala warisan kebijakan pendidikan otokratik warisan Soeharto dilawan, iklim baru demokratisasi komunikasi yang berbasis pada logika kompetisi pasar menjadi spirit baru pengkajian. Bersamaan masih kuatnya mazhab developmentalisme, terjadi adaptasi dan akomodasi kepada kekuatan pasar

media dan komunikasi yang liberalistik, dan adopsi pendekatan kajian lintas ekonomi-politik dan *cultural studies* yang bercorak kritis pada kurikulum.

Dalam situasi politisasi Ilmu Komunikasi sebagai *apparatus* pembangunanisme, studi terdahulu melihat faktor eksternal sistem politik otoriter sebagai pemicunya (Haryanto, 2001; Adiprasetio, 2019). Pemerintah mendominasi kebijakan dan tata kelola pendidikan. Pada sisi lain, faktor historis scholarship komunikasi yang berasal dari Amerika Serikat dengan ideologi kapitalistik dan corak pikir positivistik turut berpengaruh. Hingga saat ini, tradisi akademik dan model industri Komunikasi Amerika Serikat dengan ciri-ciri kompetisi terbuka dan sistem rating kuantitatif menjadi kiblat industri media di Indonesia, yang kemudian ikut memengaruhi bagaimana program studi Komunikasi meresponnya.

Dicermati dari diksi minat studi di atas, tampak bahwa pendekatan kajiannya adalah monodisiplin atau hanya fokus kepada bidang ilmu Komunikasi itu sendiri. Minat studi yang berpola lintas disiplin apalagi interdisiplin belum jamak di Indonesia. Jika diperbandingkan dengan kondisi historis sebelum reformasi 1998, tampak minat studi pada Ilmu Komunikasi tidak berubah secara signifikan. Pada era Orde Baru dengan politik pendidikan tinggi sebagai pendukung pembangunanisme, ketiga pilihan minat studi tersebut sudah ada (lihat misalnya Mulyana, 2010). Pasca reformasi politik 1998, para pengelola universitas hanya melakukan inovasi pada dimensi muatan kurikulum atau mata kuliah, bukan pada institusi prodi/jurusan. Pilihan ini secara sadar ditempuh menyesuaikan trend popularitas prodi/jurusan Komunikasi di benak publik sebagai konsumen, bukan perkembangan ilmu pengetahuan.

Popularitas prodi menjadi argumen utama mempertahankan nomenklatur. Gagasan untuk mengadopsi minat minat studi baru yang lebih mikro dan mencuat pada forum *International Communication Association* dan IAMCR di Indonesia baru sebatas wacana.

Temuan di atas mengafirmasi hasil riset sebelumnya dari Adiprasetio (2019) dan Rahardjo (2012), bahwa oleh para akademisi Komunikasi, ilmu ini hanya dianggap sebagai sebuah kajian yang penyelenggara keilmuannya memiliki orientasi menghasilkan lulusan yang cepat diserap oleh pasar. Di era tahun 2000, ilmu Komunikasi cenderung memihak pada pasar dan menjadi *'good boy'* industri media dan informasi digital yang bisnisnya meledak pasca tumbangnya rezim Orde Baru, ketimbang berposisi sebagai ilmu sosial yang memiliki kajian epistemologi yang ketat. Ilmu Komunikasi menjadi penyedia pekerja terlatih dalam berbagai bidang informasi dan industri media massa, seperti praktisi Hubungan Masyarakat, *Marketing Communication*, Jurnalis atau Praktisi Periklanan.

Secara umum, tiga strategi makro yang merepresi dunia akademik komunikasi adalah: (1) neoliberalisasi tata kelola perguruan tinggi dengan mengikuti logika kompetisi terbuka, pemberlakuan indeksasi akademik yang mengadopsi logika 'kapitalisasi pengetahuan', (2) paternalisasi-birokratisasi tata kelola melalui subordinasi posisi serta mobilitas vertikal dosen menjadi birokrat kampus atau lembaga negara. (3) dislokasi dan reduksi saintifik Komunikasi dari ilmu sosial kritis kepada semata ilmu terapan/praktis. Ketiganya merupakan bagian dari skenario besar penundukan sikap kritis dan kepedulian sosial.

Faktor struktural utama yang menjadi penyebab stagnasi kajian ilmu Komunikasi adalah dua iklim yang disebut Fleming (2021) sebagai *authoritarian turn* dan *academic star syndrome* atau Alanazi (2016) sebagai *academic rockstars*. Para dosen Ilmu Komunikasi yang berhasil meraih gelar doktor setelah kembali ke kampus tidak mendapat tempat yang memadai untuk mengembangkan pusat studi atau peta jalan risetnya, karena kewajiban mereka mengelola birokrasi. Jabatan seperti Dekan, Kepala Jurusan dan atau Rektor/Wakil Rektor membuat mereka harus merelakan kesempatan membangun fondasi kompetensi ilmu, mengelola minat riset dan publikasi jurnal yang intensif. Secara kultural, lingkungan akademik pendidikan doktoral di Indonesia yang 'gado-gado' antara menciptakan ilmuwan dan menyediakan diri sebagai produsen gelar atau batu loncatan pejabat birokrasi kampus atau mobilitas vertikal lainnya membuat profil lulusan S-3 dalam negeri lebih diukur dari keberhasilannya menduduki jabatan struktural. Glorifikasi kelulusan S-3 yang kemudian menjadi pejabat kampus memperkuat argumentasi ini.

Fenomena *social media presence* bagi para akademisi di Indonesia dengan status yang bersifat artificial menjadi ciri khas yang populer pasca meriahnya platform digital. Fenomena ini kelanjutan dari perlombaan akademisi untuk diundang/hadir di layar televisi memberikan pendapat umum sebagai strategi *personal branding*. Dalam kerangka ini, akademisi dituntut menyesuaikan diri dengan budaya layar talkshow yang lebih menegaskan aspek penampilan, intonasi bicara yang standar ketimbang substansi gagasan yang disampaikan. Trend *academic star syndrome* juga terwujud dalam tradisi mobilitas dosen untuk mencari

pekerjaan konsultan di luar kampus, seminaris, mengerjakan proyek pemerintah.

Menarik diperhatikan bahwa iklim *authoritarian turn* ini juga menular ke berbagai asosiasi profesi dan kelembagaan komunikasi. Keadaan ini merupakan risiko langsung dari 'kontrol sistemik' kepada asosiasi yang menaungi kerja-kerja pengembangan Program Studi. Organisasi ini terjebak pada peran katalisator, translator kebijakan pemerintah, mengingat pemerintah sebagai regulator tunggal program studi melalui wewenang akreditasi, sertifikasi dosen dan pendanaan hibah universitas. Kemandirian asosiasi belum dapat tercipta, karena kesadaran berorganisasi profesi masih pada kebutuhan negosiasi politis ketimbang menguatkan otonomi akademik keilmuan. Meski belum ada riset beban kinerja non-akademik dosen yang komprehensif, tetapi birokratisasi akademik dan non-akademik mengurangi, mengalihkan tugas utama sebagai produsen ilmu. Data digital jumlah publikasi dosen jurusan komunikasi di Indonesia yang masih sedikit dalam jurnal bereputasi dan melemahnya gerakan serta gagasan mengembangkan *school of communication* adalah bukti awal terjadinya penggerusan pola pikir-pola kerja dari ilmuwan ke birokrat.

Merujuk Herman dan Chomsky (2002) terkait lima filter yang memengaruhi media dan dengan kesadaran bahwa konsep ini dianalogikan ke pilihan minat studi Komunikasi, maka terdapat keselarasan kondisi obyektif. Faktor pemerintah sebagai 'pemilik' pendidikan tinggi negeri yang mengelola ratusan jurusan Ilmu Komunikasi, pemerintah selaku penyedia dana dan dominasi ideologi kapitalistik dalam praktik produksi, distribusi dan ekspansi pasar membuat minat studi komunikasi tidak

mengalami rejuvenasi. Perbedaannya dengan rezim Orde Baru, pada rezim pasca Orde Baru, kuasa kepemilikan dan modal pendidikan tinggi Komunikasi telah terbagi antara pemerintah dan industri kapitalistik yang berkiblat kepada kapitalisme pengetahuan dengan segala kebijakan turunannya. Manajemen pendidikan tinggi secara umum yang neoliberalistik menjadi mazhab tunggal pembangunan pendidikan dengan pola kerja birokratis sebagai instrumen penunjangnya.

E. Kuasa 'Digital Transnasional'

Hadirin yang saya muliakan,

Pola pikir fungsionalisme struktural mengajarkan pengambil kebijakan kampus bahwa pembelajaran merupakan instrumen pencipta manusia teknokratik. Kurikulum dirancang agar mahasiswa mampu menguasai sejumlah kompetensi tenaga teknis. Logika ini bisa dilacak pada dominasi mata kuliah yang praktikal atau menggunakan teori-praktik bersifat tutorial, atau melibatkan praktisi sebagai pengajar utama dalam mata kuliah ilmu komunikasi. Tradisi baru keterampilan riset berbasis big data sebagai unit khusus studi, seleksi mahasiswa baru yang mempertimbangkan kemampuan mengelola *follower*. Penggunaan media digital secara umum dalam proses pembelajaran selaras dengan pola pikir ini. Ambisi merebut pasar global dan menguasai ekonomi digital menjadi mantra utama. Namun, dalam diskursus ini, nama-nama korporasi digital global seperti Meta (dengan *brand* platform Facebook dan Instagram), dan Alphabet Inc. (Google dan YouTube) menjadi rujukan. Kolaborasi atau perolehan hibah riset dari korporasi global ini menjadi indikator kinerja.

Pasca disrupsi digital, selain perubahan tata kelola perguruan tinggi menuju layanan total digital, juga muncul kuasa korporasi digital global, sebagai konsekuensi dari industri teknologi nasional Indonesia yang tidak siap. Mereka itu seperti Meta dan Alphabet Inc. kini membangun infrastruktur dan jejaring konten lokal, mengelola iklim dependensi pada inovasi layanan yang terus diberikan, hingga menyaring perubahan kurikulum perguruan tinggi agar selaras dengan pasar kerja yang mereka perlukan. Secara sistematik, mereka menundukkan gagasan alternatif bagi 'lokalisasi' teknologi pembelajaran digital. Kiprah raksasa teknologi berskala global seperti Google, Facebook, atau YouTube dalam kampanye literasi digital atau pendirian unit pemeriksa fakta di media siber selain membantu memperkuat kewaspadaan publik atas bahaya teknologi informasi, juga menjadi pintu masuk bagi transnasionalisasi dan dependensi terhadap produk global teknologi digital di Indonesia. Agenda de-Amerikanisasi atau glokalisasi di sektor teknologi digital kian dihindari.

Kuasa pasar transnasional ini memengaruhi pola pikir pengelolaan universitas dan mengakselerasi ide *entrepreneurial university*, menghindari *research based university*. Dalam kerangka pikir entrepreneurial, maka Ilmu Komunikasi dirancang sebagai produk yang terus mengalami inovasi layanan, bukan substansi kajian. Ia akan divalidasi dengan akreditasi yang merujuk prodi bermazhab kewirausahaan, diminta membuka kelas jarak jauh, kampus cabang agar terus meraup potensi mahasiswa lebih banyak. Mengikuti Schumpeter (1934), kampus sibuk berpikir bagaimana meraih keuntungan finansial, mempertahankan reputasi di benak psikologis publik, atau menjalin aliansi bisnis dan adopsi teknologi.

Terjadi kapitalisme akademik (Jessop, 2018), mengacu pemikiran the '*knowledge-based economy*' yang menuntut pengajaran dan riset selaras dengan penciptaan manusia sebagai asset industrial, mendukung sistem ekonomi perburuhan, menyediakan infrastruktur komunikasi bagi akumulasi keuntungan finansial. Pemikiran pengetahuan berbasis ekonomi adalah mendorong mahasiswa dan pengajar menjadi wirausaha dengan pengetahuan sebagai produknya (*enterprising bearers of intellectual capital*). Krisis keuangan besar-besaran pada periode 1990an hingga 2000an menjadi justifikator liberalisasi pengetahuan Komunikasi agar menjadi penopang rehabilitasi ekonomi, bukan sosial. Ilmu Komunikasi bagian dari produk cepat saji, melalui proses pendidikan yang cepat lulus.

Merujuk Fleming (2021) dan juga Rosser (2021), dosen atau akademia dalam perguruan tinggi yang neoliberalistik adalah buruh yang bekerja untuk melayani mahasiswa sebagai konsumen, dan pengetahuan adalah produk konsumtif yang diperjualbelikan secara instan. Praktik transaksi gelar akademis atau reduksi proses perkuliahan dari reguler ke akselerasi, kuliah jarak jauh adalah pengembangan kreatifitas dari pola pikir ini. Dalam kajian historisnya, gejala kuat neoliberalisasi universitas ini selaras dengan gerakan politisasi di satu sisi yang tampak pada tradisi akademik di negara-negara berkembang, dan kritik atas model pendidikan tinggi ala Humboldtian yang fokus pengajaran dan riset, ketika kampus dianggap sebagai menara gading, jauh dari publik di sisi lain.

Pilihan mengintegrasikan diri dalam pasar transnasional bagi universitas merupakan isu klasik sejak tahun 1990 melalui liberalisasi pendidikan (Yudiatmaja,

2015). Liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dimulai ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi berhak menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya (Pasal 50 ayat 6). Proses ini kemudian berlanjut dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007, yang mengkategorikan pendidikan sebagai suatu bidang usaha. Dalam PP ini, sektor pendidikan boleh mendapatkan modal asing hingga angka 49%. Selaras dengan ini, beberapa perguruan tinggi negeri ditetapkan berstatus Badan Hukum Milik Negara, seperti UGM, UI, ITB, dan IPB. Mereka berhak menjalankan peraturan yang ada dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan juga Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007.

Klimaks dari liberalisasi pendidikan tinggi terjadi pada tahun 2009, ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. UU ini menuai kontroversi karena melegitimasi pelepasan tanggung jawab pemerintah pada ranah pendidikan. Meskipun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2012, DPR kembali merumuskan UU Pendidikan Tinggi, yang memiliki semangat serupa. Indikasi liberalisasi antara lain ditunjukkan oleh beberapa universitas besar yang memiliki program kerja sama *dual degree* dengan universitas luar negeri. Muncul kelas internasional yang memungkinkan mahasiswa asing untuk belajar, impor dosen dari luar negeri untuk mengajar di universitas tersebut. Belajar dari Tiongkok dan India, Indonesia memilih menerapkan ‘liberalisasi secara terbatas’ program studi tertentu termasuk Prodi Ilmu Komunikasi.

Puncaknya, revolusi teknologi digital yang secara paradigma dan kendali korporasi terpusat di Amerika Serikat sebagai motor utama liberalisasi pendidikan tinggi memunculkan kuasa transnasional terhadap studi-studi komunikasi di Indonesia. Desain kurikulum yang mengadopsi diksi 'digital' menjadi indikator baru kemampuan adaptasi terhadap globalisasi dan internasionalisasi. Implikasi dari ini adalah apa yang disebut Wahyono (2024) sebagai involusi dan tandusnya habitat epistemologi ilmu sosial. Kuasa teknologi digital memaksa penerimaan atas paradigma tunggal kajian Komunikasi yang membela paradigma pragmatis, positivistik, dan secara historis berakar kuat pada Mazhab Chicago School di Amerika Serikat. Pola pikir ini mengabaikan adanya kebutuhan perkembangan ilmu sosial kritis di dalam wilayah di mana praksis komunikasi berkembang, menegasi epistemologi, pluralisme berbagai mazhab lain yang dapat berinteraksi secara metodologis dengan ilmu Komunikasi, sekaligus resisten terhadap segala kritik atas kemapanan.

Menyusul runtuhnya rezim Orde Baru yang monoloyalistik terhadap dunia pendidikan tinggi, pendulum kekuasaan yang menentukan arah perguruan tinggi bergeser kepada aktor baru: kelompok industri berskala nasional dan internasional. Ia muncul atas nama relevansi pendidikan komunikasi dengan kebutuhan pasar kerja. Manusia dengan dimensi tunggal *(one dimensional man)* yang dipopulerkan Herbert Marcuse (2002) terwakili oleh wajah akademisi dan mahasiswa komunikasi sebagai buruh industri pendidikan dan buruh industri komunikasi. Paradigma dan orientasi kurikulum komunikasi telah berubah: dari pemenuhan pembangunan yang secara eksklusif dikelola pemerintah ke peran

praktis produsen manusia terampil untuk kebutuhan kompetisi bisnis. Jika di era 1970-an-1990-an, peran untuk produksi pengetahuan komunikasi dipaksa selaras dengan kepentingan propaganda pembangunan nasional, sekarang perannya bergeser menjadi propaganda transnasional. Mitranya bergeser, dari pemerintah ke pelaku industri raksasa digital berskala nasional dan global.

Memperhatikan stagnasi kajian komunikasi di atas, baik yang dipicu oleh kebijakan warisan Orde Baru maupun oleh kekuatan industri digital berskala global, maka dua asosiasi: Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) dan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) perlu melakukan reformulasi pola kerja, membangun kolaborasi program kerja yang mengarah kepada dewesternisasi-dekolonisasi ilmu Komunikasi secara sistematik, tidak berhenti pada wacana. Penyegaran wacana alternatif ini harus terus muncul dalam setiap momentum konferensi tahunan atau hajatan regenerasi organisasi. Dua asosiasi tersebut tidak sibuk selaku *organizer* program pemerintah, agensi kebijakan, tetapi mereka keluar dari kooptasi logika dan pelaku pasar dan birokrasi predatoris. Untuk mengawalinya, sebuah 'buku besar' memuat tulisan ahli komunikasi di Indonesia tentang dewesternisasi, asianisasi atau Indonesianisasi komunikasi perlu segera terbit. Inspirasi bisa diambil dari buku berjudul: *De-Westernizing Media Studies* (Curran dan Park, 2000).

F. Penutup

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam beberapa kesempatan bertemu para pegiat media publik dan perpustakaan, dengan membayangkan kondisi di negara-negara demokrasi maju Eropa, diskursus perguruan tinggi dan budaya akademik di Indonesia kerap kali saya padankan dengan kondisi dua lembaga publik lain di Indonesia: yaitu museum dan media penyiaran publik. Museum di Indonesia memiliki kecenderungan *government centric*, rumah dogmatisme ideologi otoriter, bukan ruang *public-private centric*, apalagi *commercial entity*. Privatisasi museum sudah terjadi, meskipun belum terpadu, masih sporadis. Museum sebagai *public-private* tertinggal dari *gallery* seni-biennale, atau pengelolaan gedung bersejarah lain, baik museum maupun media publik dan perguruan tinggi belum terintegrasi ke dalam kebijakan *knowledge society*, ia masih ditempatkan sebagai *heritage/cultural preservation.* Sementara itu terdapat isu struktural terkait kepemilikan, pendanaan dan *public engagement*. Seperti halnya perguruan tinggi, persoalan kepemimpinan, orientasi layanan koleksi dan keamanan artefak koleksi membuat museum di Indonesia tidak mandiri, masih *dogmatic center,* bukan *public centre.* Seperti juga di kampus, perlu diakhiri era politisasi museum, menuju ke era museum sebagai ruang publik: semua orang bisa memberi makna secara bebas.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka sudah saatnya Indonesia kembali ke haluan yang telah digariskan konstitusi UUD 1945 bahwa layanan pendidikan di perguruan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD 1945 pasal 31 ayat 3 berbunyi: *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu*

sistem pendidikan nasional, yang…dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa... Menjadikan perguruan tinggi sebagai ruang pencerdasan warga negara yang otonom adalah amanat konstitusi, yang dirumuskan para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Konstitusi juga menegaskan bahwa layanan pendidikan tinggi adalah tugas pemerintah mewakili negara, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau tugas yang dibebankan kepada rakyat.

Kini jelas, upaya penerjemahan amanat tersebut ke dalam berbagai regulasi yang lebih rendah jauh meninggalkan spirit konstitusi. Neoliberalisasi pendidikan dan upaya pewarisan politik otoriter menyebabkan pendidikan tinggi kehilangan haluan. Kebutuhan jangka pendek menjaga stabilitas atau tertib sosial mengabaikan kepentingan jangka panjang membangun budaya akademik yang sehat dan berwibawa di kampus. Oleh karena itu, gerakan kembali ke haluan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, yang dikelola secara otonom mutlak berlaku. Ini tidak harus berarti, misalnya menempati posisi strategis di pemerintahan, tetapi advokasi untuk reformasi kebijakan pendidikan tinggi yang paripurna.

Fenomena mutakhir yang terjadi di Indonesia dalam dua dekade terakhir mengarah kepada perilaku *intellectual allegiance*: para akademisi menjadi *apparatus* produsen angka pengetahuan, penyokong kebijakan pembangunan, terbenam dalam padatnya kerja mengajar, riset, membuat laporan ini-itu, *suntuk* di dalam kampus. Sebuah karikatur yang beredar di media sosial saat peringatan hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024 menggambarkan dengan baik komplikasi tugas dosen: sejak mengajar, koreksi ujian mahasiswa, mengisi data

Beban Kinerja Dosen (BKD), mengikuti konferensi, menginput data diri di SISTER, menjadi pejabat struktural hingga mengurus jabatan fungsional. Dalam hal ini, upaya peninjauan ulang beban kerja dosen, mengurangi stress dan gejala psikologis lain termasuk memberi sangsi atas praktik pelanggaran etika akademik (seperti kasus guru besar yang menulis 160 artikel dalam tiga bulan) tidak cukup, sebab ini semua persoalan hilir, bukan hulu.

Para pimpinan perguruan tinggi dan akademisi perlu menjaga 'kewarasan' dan dalam jangka pendek perlu meninjau rumusan resmi tentang pedoman penyelenggaraan kebebasan akademik di kampus masing-masing. Riset Huda, dkk. (2020) pada sepuluh universitas yang mewakili Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua mengindikasikan pemahaman kebebasan akademik para akademisi yang masih berpola saintifik, sehingga represi struktural dari pemerintah tidak dianggap sebagai masalah. Penting menggeser perspektif saintifik ini dari makna kebebasan akademik yang dominan dan nyaris menjadi keyakinan tunggal, juga menggeser perspektif utilitarian-pragmatik ke arah perspektif kepublikan. Upaya kecil ini akan menjadi bagian dari gerakan semesta menghindari jebakan 'pengetahuan dan institusi kampus sebagai –merujuk Christensen (2023) ketika membahas konsep pemikiran Foucault tentang *disciplinary power and discourse* sebagai alat kontrol dan pendisiplinan akademik oleh pihak eksternal dengan pola yang tidak selalu *top-down*.

Akademisi perlu kembali memahami trilogi Hegelian (tesa, antitesa, sintesa), bahwa tugas akademikus sejatinya melingkupi tiga aspek ini: Pertama, membuat tesa, memproduksi ilmu pengetahuan. Kedua, melakukan antitesa: melakukan analisis sosial kritis.

Ketiga, sintesa: keterlibatan diri dalam gerakan sosial. Dalam situasi politik nasional yang tidak normal dan ketika demokrasi mengalami regresi (lihat: Thomas Power & Eva Warburton, 2020), selain mempertebal analisis, akademisi perlu memperbanyak keterlibatan diri dengan masyarakat sipil. Senada dengan ini, sebagai orang beragama, trilogi Hegelian tersebut juga selaras dengan trilogi aktivisme sosial dalam perspektif Islam, yang berpusat pada konsep *amar makruf nahi munkar* dan dalam praktiknya mewujud pada tiga aksiologis: tindakan fisik, tindakan intelektual, tindakan subjektif oposisional.

Trilogi aktivisme sosial ini merujuk hadis Nabi Muhammad saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ ٱلإِيْمَانِ

Abu Sa'id Al Khudri radiallaahu anhu berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman (HR. Muslim).

'Perlawanan balik' atau resistensi harus terus diupayakan, baik oleh individu dosen maupun perguruan tinggi. *Self-reflection* bahwa universitas akan selalu berada dalam kondisi 'rentan' *(vulnerable)* dari kekuatan politik atau pasar yang cenderung 'resilience' (tangguh) harus menjadi modal sosial dan energi positif kerja advokasi perbaikan tata kelola kampus lewat penguatan

regulasi internal *(self-regulation)* yang berlandaskan moral akademik. Para akademisi perlu terus mengenali 'kerentanannya' dan pada saat yang sama mengidentifikasi 'ketangguhan' yang dimiliki, untuk kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam upaya menjaga marwahnya sebagai lembaga 'pengetahuan', dan pusat untuk 'perubahan sosial'. Dalam hal ini, diperlukan para pemimpin universitas yang berjiwa independen, tampil sebagai aktivis sosial, bukan birokrat.

Arus balik perilaku *anti-intellectualism* (Sultana, 2018) dipastikan akan menghambat gerakan kebebasan akademik. Fenomena semakin 'brutalnya' iklan-iklan penawaran menulis artikel ilmiah dengan cepat, melibatkan *artificial intelligence, bootcamp* singkat bagaimana tips menjadi guru besar akan menjadi kerikil penghalang. Tawaran 'jalan pintas' mencapai pangkat akademis atau memenuhi laporan kinerja administratif ini kerap kali melibatkan akademisi bergelar doktor, menandai marketisasi total sumberdaya pengalaman akademis, melawan akal sehat bahwa menjadi guru besar adalah pencapaian intelektual yang sejatinya dipenuhi oleh nilai etis, bukan semata perilaku instrumental. Menulis artikel adalah ekspresi etis-epistemologis, bukan semata kegiatan teknis-teknologis.

Secara kolektif dan berskala global, gerakan perlawanan represi akademik perlu terus menggelora dalam bingkai kampanye *healthy and sustainable academic life*. Upaya ini harus bermakna perjuangan universal mengembalikan posisi dan nilai *(values)* luhur universitas yang sejatinya menjadi suluh kebangsaan supaya berada di atas (tidak menjadi sub-sistem) dari nilai-nilai pragmatisme politik ekonomi yang dianut para

pengelola negara. Dalam hal ini, tiga kelompok strategis: Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Serikat Pekerja Kampus (SPK) dan Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS) perlu terus menggalang dukungan publik nasional dan internasional. Ketiga organisasi ini awalnya mencerminkan 'resistensi senyap', tetapi perlahan mencuri perhatian. Pegiat organisasi Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) juga berperan penting dalam mengakselerasi generasi akademisi-aktivis yang keluar dari zona nyaman tugas tradisional: mengajar, meneliti. Laporan ALMI berjudul: *Reflecting on Indonesia's young academy movement* (Rakhmani, dkk., 2024) dapat menjadi pijakan melihat capaian gerakan sosial. Otoritarianisme sejatinya tidak mati pasca Orde Baru, ia hidup di alam pikir dan praktek demokrasi prosedural.

Di tengah krisis kebebasan akademik, akademisi komunikasi terus diingatkan tugas menyegarkan disiplin Ilmu Komunikasi di Indonesia, urgensi otonomi akademis paripurna dan transformasi kurikulum komunikasi. Gagasan studi berbasis lokalitas (Masduki, 2015; Antoni, dkk., 2017; Nazaruddin dan Ningsih, 2018) sebagai antitesis atas dominasi tradisi keilmuan komunikasi yang berlatar belakang Barat seperti Eropa dan Amerika perlu menjadi sebuah wacana kolektif, terutama digerakkan oleh asosiasi nasional. Patut diakui, di tengah 'hiruk-pikuk' mengadaptasi regulasi pemerintah yang datangnya bertubi-tubi, diskursus dewesternisasi dan dekolonisasi ilmu komunikasi masih marginal, hanya pelengkap pada konferensi tahunan atau rapat kerja asosiasi, bukan menu utama kegiatan.

Bapak/Ibu yang saya hormati, mengakhiri pidato pengukuhan ini, izinkan saya untuk mengutip sebagian

artikel saya yang dimuat oleh harian Kompas tanggal 22 Desember 2023 berjudul: *Guru Besar dan Krisis Keteladanan Akademik.* Kata 'Besar' dalam 'Guru Besar' sebetulnya adalah intisari dari pencapaian akademis tertinggi ini. Maknanya, besar amanah dan besarnya harapan publik akan kiprah *scholarship,* kontribusi akademis yang paripurna, bukan kontribusi politik dan ekonomi. Dengan kata lain, Guru Besar bukan persoalan menjadi 'orang besar', apalagi bergaji besar. Guru besar berarti tanggung jawab akademik besar. Ia refleksi pencapaian akademik *(academic achievement),* yang telah mendapat apresiasi secara global. Dalam kerangka ini, ada baiknya jika seorang profesor tidak perlu disapa dengan kata Prof secara berlebihan di ruang publik. Ia cukup tertulis di dokumen.

Guru besar adalah pengawal tiga keteladanan publik sekaligus: teladan dalam produksi karya, rujukan disiplin etis dalam publikasi, dan figur panutan dalam relasi sosial. Mereka diharapkan menjadi sosok yang digambarkan filsuf Antonio Gramsci (Ramos, 1982) sebagai 'intelektual organik,' yang mengkombinasikan kerja intelektual akademis di dalam kampus dengan kerja lapangan, aktivisme sosial dan digital untuk perubahan sosial di luar pagar kampus. Para ilmuwan ini menempatkan ilmu sebagai amunisi, kearifan jiwa sebagai kompas, sikap kritis dan advokasi sosial sebagai pola kerja. Mereka bukan kaum elit, tetapi bagian dari *kawula alit*, gaya hidupnya cenderung asketik, menyelami hati publik.

Dalam budaya akademik yang sehat, guru merupakan sosok teladan dalam aktivitas mengajar, meneliti dan publikasi. Besar itu berarti tugasnya/mandatnya paripurna. Apabila guru kecil

tugasnya berjalan kaki, maka guru besar seharusnya berlari. Selaras dengan ini, merujuk pada struktur jabatan fungsional kampus, jika seorang Asisten Ahli itu boleh berjalan santai, maka mandat jabatan Lektor adalah berjalan dengan lebih terpola. Sementara itu, pemegang jabatan Lektor Kepala (LK) dituntut lari maraton, dan akhirnya seorang profesor wajib membuat laku *sprint,* jalan cepat, memimpin di garis depan. Jangan sampai terjadi fenomena terbalik: para profesor justru hidupnya santai, 'pensiun'. Guru besar adalah ruang akademik baru yang lebih kuat, bukan tujuan akhir perjalanan akademik.

Iklim akademik perguruan tinggi di Indonesia yang mengalami krisis melahirkan tiga model profesor yang saling bertolak belakang. Pertama, profesor yang berbasis lompatan akademik luar biasa, tampak dari puluhan hingga ratusan karya publikasi akademik yang konsisten dengan bidang ilmunya dan dapat diakses oleh publik. Mereka berproses secara alamiah dan jabatan profesor hanyalah bonus-nya. Kedua, profesor yang lahir dari praktik politisasi, transaksi politik akademik melalui gelar profesor kehormatan, jejak akademiknya minimal, bahkan tidak ada. Ketiga, profesor yang lahir 'cepat saji', lewat beragam program percepatan, kursus singkat menulis hingga pendampingan.

Kategori pertama akan berkontribusi kepada peningkatan jumlah ilmuwan, penguatan disiplin keilmuan yang memperkuat reputasi perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan. Sementara itu, kategori kedua justru berkontribusi memperkeruh reputasi kampus dari lembaga akademik menjadi lembaga politik. Kategori ketiga jumlahnya semakin meningkat, melahirkan budaya akademik instan yang berlanjut pasca menjadi profesor.

Kiprah profesor akselerasi ini ibarat makanan cepat saji: ada tetapi 'kurang bergizi.'

Problem lain muncul ketika budaya akademik di Indonesia mengaburkan makna dan tugas profesional dosen dengan birokrat kampus-pemerintahan, dianggap saling menunjang. Status profesor menjadi alat mobilitas sosial vertikal, feodalisasi dan perilaku sosial anomali di mana seorang guru besar bergaya hidup priyayi. Profesor juga kerap kali dianggap sebagai puncak karier dan para penerimanya merasa sudah 'pensiun' dari dunia akademik, berpindah ke dunia politik, menjadi birokrat kampus dan sebagainya. Belakangan bahkan terjadi inflasi menyusul beberapa profesor terindikasi korupsi dan kolusi.

Pendek kata, kondisi ini berlawanan dengan apa yang digagas Alexander Humboldt di Universitas Berlin tahun 1800-an ketika universitas dan para profesor memiliki *academic freedom* dari tekanan politik dan industri dalam riset dan pengajaran. Menjadi profesor di Indonesia masih dianggap identitas sosial dan instrumen mobilitas vertikal, dan pemangkunya ingin selalu disebut di pergaulan non-akademis. Profesor bukan ruang dan mandat untuk kerja advokasi dan keterlibatan sosial. Belakangan, terjadi marketisasi gelar ini untuk membuat kursus 'cepat' publikasi artikel dan meraih jabatan akademik.

G. Ucapan Terima Kasih

Perjalanan akademik yang saya lewati tanpa disadari ternyata 'berwarna', tidak linier, 'keluar dari standar normal' para pembelajar di Indonesia. Semua ini misalnya terangkum dalam gelar yang 'tak disengaja' lintas disiplin: S.Ag., M.Si., Dr.rer.soc. Gelar S.Ag. ini

saya peroleh dari Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Islam dan gelar M.Si. dari FISIP Jurusan Ilmu Komunikasi. Adapun gelar Dr.rer.soc. saya peroleh dari studi media publik. Lebih jauh, pengalaman berkiprah lintas profesi turut memperkaya perjalanan profesional, sejak praktisi radio siaran di Yogyakarta dan Jakarta hingga hijrah menjadi pengajar Ilmu Komunikasi dan Jurnalisme di UII. Pengalaman menjadi jurnalis di Radio Unisi kemudian mendapat mandat menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta dan anggota Majelis Etik AJI Indonesia telah membangun pola pikir dan pendekatan saya dalam advokasi kebebasan pers dan berekspresi. Keterlibatan mendirikan dan mengelola sejumlah lembaga sosial seperti MPM, RPLPP, PR2Media memperkaya perspektif terkait masyarakat sipil sektor media di Indonesia dan dunia. Secara khusus, pengalaman 'tugas negara' sebagai salah satu Direktur di RRI Pusat selama 2010-2013, menginspirasi riset doktoral soal media penyiaran publik yang sudah terbit diterbitkan Palgrave McMillan, London (2020).

Adapun pemilihan topik pidato ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan dalam berbagai keprihatinan terhadap krisis kebebasan akademik di perguruan tinggi sejak awal 2020 antara lain melalui Forum Cik Ditiro. Saya melihat perguruan tinggi sebagai bagian masyarakat sipil yang dilemahkan di Indonesia. Adapun 'rekam jejak' saya dalam studi Media dan Jurnalisme yang menjadi mandat Guru Besar dapat ditelusuri pada buku yang secara terpisah diluncurkan hari ini. Buku berjudul: *Negara, Media dan Jurnalisme di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Penerbit Buku Kompas, 2024) berisi tulisan opini yang merefleksikan keterlibatan subjektif dalam advokasi

kebebasan pers yang menekankan pentingnya tanggung jawab negara. Terima kasih Penerbit Buku Kompas yang bersedia mempublikasikan buku sederhana ini. Bersamaan peluncuran buku, akan ada pameran arsip berita harian Kedaulatan Rakyat di selasar utara Perpustakaan, Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km 14,5.

Dalam segala langkah kehidupan sejak tinggal di desa Telaga Langsat, Kandangan lalu hijrah ke Banjarbaru (Kalimantan Selatan), berkelana ke Yogyakarta (1992-sekarang), 'tinggal sejenak' di Jakarta kemudian menetap hampir lima tahun di Cologne dan Munich, Jerman, ada sangat banyak pihak yang memberi warna: orang tua, sahabat, kolega, inspirator. Perjalanan menuju jabatan Guru Besar ibarat memahat dinding, menata 'bata demi bata atas bangunan rumah', sejak sekolah dasar, menengah, S1, S2, S3 yang saya jalani di berbagai kota berbeda. Atas dasar ini semua, maka pertama dan terutama, saya bersyukur kepada Allah Swt. atas anugerah nikmat, petunjuk dan hidayah yang diberikan hingga mencapai tahapan akademik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Oleh karena kekuasaan-Nya, maka saya dapat mencapai posisi ini sejak pengajuan berkas hingga penetapan yang cukup lancar. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan keterbatasan halaman buku pidato ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak, khususnya nama-nama penting dalam 'naik turun' perjalanan akademik saya berikut ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi V DIY (sewaktu

Prof Aris Junaidi) yang telah memberikan amanah jabatan fungsional Guru Besar kepada saya.

Bapak Rektor UII sejak Dr. Ir. Luthfi Hasan (2004) hingga Prof. Fathul Wahid, Ph.D. (2024) yang telah memberi ruang petualangan akademik saya selaku pengajar, peneliti, pengabdi pada lembaga struktural di Universitas Islam Indonesia.

Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya dan Senat Universitas, juga Ketua dan anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia.

Secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman tenaga kependidikan di Jurusan/Prodi Ilmu Komunikasi, tendik Fakultas dan Universitas di UII yang telah bekerja keras mempersiapkan dan memproses borang guru besar, terutama kepada Mbak Sulasmi, Hartiwi, Mas Zarkoni dan tim, Mbak Esti Rahman dan tim.

Bu Dekan Dr.Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog, dan para Wakil Dekan di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII, serta Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Mas Iwan Awaluddin Yusuf, PhD beserta tim: terima kasih telah memberikan dukungan total. Secara khusus, hormat saya kepada dua reviewer borang Guru Besar ini, yaitu Prof. Dr. Eni Maryani (FIKOM UNPAD) dan Prof. Dr. Ana Nadhya Abrar (FISIPOL UGM).

Dalam perjalanan akademik menempuh doktoral di Jerman (2015-2020), saya memperoleh bimbingan paripurna dari Prof. Dr. Thomas Hanitzsch (IfKW University of Munich). Terima kasih, Thomas. Disusul bimbingan dari Prof. Dr. Leen d'Haenens dan Prof. Dr. Johanes. Lebih dari sekedar penguji disertasi, mereka

adalah inspirator saya menulis artikel, memilih menjadi akademisi dan bersikap asketik. Kami kerap kali bertemu di konferensi terkait media publik di beberapa kota di Eropa (2016-2019), berdiskusi sambil menikmati kanal legendaris di Amsterdam, atau mengitari gedung-gedung tua di Madrid, Spanyol.

Kolega seperjuangan di 'rumah besar' *Kaliurang Communication School*: Program Studi Ilmu Komunikasi UII, sejak awal berdiri 18 Juni 2004 hingga sekarang: Anang Hermawan, Iwan Awaluddin Yusuf, Puji Hariyanti, Muzayin Nazaruddin, Ratna Permana Sari, Abdul Rohman (kini di RMIT Vietnam), Ida Nurani Dewi Kodrat Ningsih, Narayana Mahendra Prastya, Subhan Afifi, Zaki Habibi, Nadia Wasta Utami, Ali Minanto, Herman Felani, Holy Rafika, Sumekar Tanjung, Puji Rianto, Anggi Arif Fudin Setiadi, Dian Dwi Anisa, Lutviah, Fatma Nurani, Sulkhan, Desmalinda dan Ibnu Darmawan. Maturnuwun semua inspirasi dan kehangatan, kekeluargaan untuk perjalanan akademik saya.

Teman-teman tendik Prodi Ilmu Komunikasi UII, khususnya Zarkoni, Marjito Iskandar Tri Gunawan dan Yudi Winarto, terima kasih atas dedikasi yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Iven Sumardiyantoro, Desyatri Parawahyu Mayangsari, Rizka Aulia Ramadhani, Anugrah Pambudi W, Putri Asriyani, Ajeng Putri Andani, Annisa Putri Jiany, Bayu Prabowo, Meigitaria Sanita, Zaidan Iman F, Ra'ifan Alfisya N, Novi Iswa Anggraini, Wulan Ningsih. Selain Prodi Ilkom, keluarga struktural-akademis saya sejak 2022 juga adalah Pusat Penelitian Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat UII. Salam berkarya selalu untuk Pak Eko, Pak Edi, Pak Jun, Mas Win, Bambang, Mei, Ronny, Arno, dkk.

Sedikit mundur ke belakang', saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para guru SDN Telaga Langsat, Kandangan, Kalimantan Selatan dan para *Asatidz* selama saya menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (tingkat Tsanawiyah dan Aliyah) yang membentuk karakter dan optimisme sebagai pengelana dan pembelajar sejak kecil. Terima kasih kepada guru-guru saya di Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN/UIN Sunan Kalijaga (1992-1999) dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hari ini kedua institusi tempat saya menjalin romantika jiwa akademis diwakili dua sahabat dan senior: Prof. Iswandi Syahputra (Wakil Rektor I UIN Sunan Kalijaga) dan Prof. Widodo Muktiyo dari UNS. Apresiasi mendalam untuk dua pembimbing tesis S-2 saya di Universitas Sebelas Maret Solo (2021-2023): Prof. Sasa Djuarsa dan Victor Menayang, Ph.D. (FISIP Universitas Indonesia) yang sudah mendahului.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan AJI Yogyakarta adalah rumah saya belajar jurnalistik dan aktivisme untuk kebebasan pers sejak tahun 1994 hingga sekarang. Terima kasih untuk persahabatannya: Mas Nezar (kini Wamen Kominfo), Abdul Manan, Suwarjono, Luviana, Evi Mariani, Mbak Ati Nurbaiti, Nani, Bayu, Mas Willy, Sasmito, Ika Ningtyas, Wawan ABK, Raihul Fadjri, Bambang MBK, Shinta, Machmud, Pito Agustin, Hendrawan, Bhekti, Januardi, dkk. (tanpa bermaksud mengesampingkan ratusan nama kawan lain, semata keterbatasan halaman). Selain AJI, Radio Prima Unisi (radio berita), sejak berkantor di Jl. Pasar Kembang hingga Kampus UII Demangan adalah etape perjalanan awal jurnalistik saya. Saya wajib menyampaikan terima kasih untuk segala romantisme kehidupan sebagai jurnalis

radio, pemandu talkshow dan pelatih media. Hormat sepenuhnya kepada tiga tokoh inspirator: Kecuk Sahana (alm.), Errol Jonathans (alm.) dan Djoko Tjahyo.

Di luar 'dinding tebal kampus', melebur dengan 'komunitas epistemik' para aktivis media dan masyarakat sipil pro-demokrasi merupakan sebuah kehormatan dan kemewahan. Terima kasih keluarga besar Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Mbak Rahayu, Novi Kurnia, Wendratama, Prof. Bayu Wahyono, Darmanto, Fiky, Wisnu Martha, Wisnu Prasetyo, Faried Cahyono, Saifudin Zuhri, Monika Pretty Aprilia, Putri Laksmi, Intania, Mira Ardhia, Zaki Trisni, Paulus Angre, berikut para mitra peneliti PR2Media di seluruh Indonesia. *Wabil-khusus* pada Bang Amir Effendi Siregar (almarhum) yang menjadi penggerak studi-advokasi regulasi di sektor media dan jurnalisme di Indonesia.

Sejak tahun 2010 hingga sekarang, lembaga penyiaran/media publik menjadi salah satu fokus perhatian saya, antara lain bersama para pegiat Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP) dan Masyarakat Peduli Media (MPM): Pak Lukas, Mas Budi H., Pambudi, Firly Annisa, Mas Widodo. Secara khusus saya sangat berterima kasih kepada dua pemikir media publik: Mas Darmanto dan Paulus Widiyanto. Tentu saja, terima kasih saya kepada keluarga besar Radio Republik Indonesia (RRI) khususnya Mbak Niken dan Mbak Nuning, yang telah memberi amanah dan ruang bagi saya mengenali dan terjun lapangan melihat dinamika serta menyelami suasana kebatinan angkasawan radio publik di Indonesia.

Terima kasih kepada Prof. Musa Asy'ari (UIN Sunan Kalijaga) dan Prof. Heru Nugroho (Sosiologi

UGM) yang ‘membuka jalan’ menikmati beragam mazhab kritis, dan memberi tips mengantisipasi ‘kemelut ekonomi’ seorang akademisi. Hormat kepada guru Prof. Rochmat Wahab (Universitas Negeri Yogyakarta), Prof. Mujiburrahman (Rektor UIN Antasari); Bang Kamal Firdaus atas semua inspirasi akademik dan aktivisme.

Pasca studi S-3, iklim akademik yang menggairahkan telah mempertemukan saya dengan sejumlah *scholar* dan Indonesianis yang memberi warna kolaborasi internasional. Mereka antara lain: Edwin Jurriens dan Ross Tapsell (University of Melbourne), Violet B. Valdez (Ateneo de Manila University), Barbara Siuta Tokarska (CUE, Polandia), Nurhaya Muchtar (Indiana University, Pennsylvania Amerika Serikat), Cherian George dan Edson C. Tandoc (Nanyang Technological University, Singapura), Sadia Jamil (Nottingham University, Ningbo China), Mira Rochyadi (Ilmenau University, Jerman), Anis Rahman, Minna Aslama Horowitz (University of Helsinki, Finland), Alessandro d’Arma (Westminster University, London), Nico Carpentier (Charles University, Praha. *Thanks* Nico, Presiden IAMCR hingga 2024 yang menunjuk saya sebagai Indonesian Ambassador to IAMCR), Corinna Lauerer (LMU Munich, Jerman), Jorg Matthes (Vienna University Austria), dan Vincent Kuitenbrouwer (University van Amsterdam/KITLV Belanda) serta komunitas peneliti isu-isu keamanan jurnalis dunia (bermarkas di University of Liverpool). *Vielen Danke.*

Para senior akademisi dan tokoh publik di Yogya yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI Orwil DIY) dan yang tergabung dalam Himpunan Alumni Jerman Yogyakarta (HAJY) maturnuwun atas segala pencerahannya. Terima kasih

untuk pengalaman singkat mengkaji media dan konflik sosial secara lintas disiplin di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM yang pada saat saya aktif (2007-2012) dipimpin Dr. Muhadi Sugiono dan Prof. Mohtar Mas'oed. Pengalaman ini menjadi modal saya bergabung dalam tim tangguh di lembaga yang baru saja didirikan: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) di Universitas Islam Indonesia. Salam merdeka dan berdaulat untuk semua.

Maturnuwun kepada pengurus pusat ISKI di bawah komando Kang Dadang Rahmat Hidayat dan ASPIKOM di bawah komando Mas Bekti Istiyanto dan Mbak Anna Agustina. Juga para pegiat ASPIKOM tanpa batas: Mas Setio Budi, Sulhan, Mbak Yani, Edwi. Kemudian, pegiat masyarakat sipil penyiaran Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), khususnya Mbak Nina Mutmainnah, Irwa, Dina, Ikbal, Mas Hari, Wawan (alm), Hendriyani, Eriyanto; aktivis Aliansi Akademisi Komunikasi Indonesia untuk Pengendalian Tembakau: Mbak Eni, Lestari, Kiki, Rizanna, serta aktivis Koalisi Kebijakan Sleman Sehat.

Teman-teman aktivis sosial lintas-organisasi yang tergabung dalam Forum Cik Ditiro, rumah bersama masyarakat sipil pro-demokrasi: Sanaullaili, Tri Wahyu, Tri Noviana, Mbak Damai, Mbak Zaki, Mas Joyo dan Mbak Adri, Himawan Kurniadi, Zen. Dan kepada ratusan pegiat FCD, Jagad dan Gejayan Memanggil: salam reformasi. Mas Anang Saptoto dan tim pameran arsip Kedaulatan Rakyat: menyala selalu karya-karya seninya.

Terima kasih untuk empat sahabat yang memberi banyak *insight* soal kebebasan akademik di Indonesia hari ini: Mas Fathul Wahid (Rektor UII), Eko Riyadi, Wijayanto (kini Wakil Rektor UNDIP, dan Herlambang P. Wiratraman (pendiri KIKA, dosen FH UGM). Mas

Darmanto, Iwan, Muzayin, Holy Rafika, Zaki Habibi dan Puji Rianto: terima kasih telah meluangkan waktu membaca dan memberi masukan untuk naskah pidato ini.

Akhirnya, kepada tiga orang paling penting dalam perjalanan karier akademik dan kehidupan sosial saya: almarhum Ibunda Siti Khadijah, Ayahanda Haji Baseran dan istriku 'belahan jiwaku' Ninik Sri Rahayu. Ibunda telah mengajarkan saya bagaimana menjadi guru pejuang tanpa pamrih: hadir di kelas yang berdinding papan dan lanjut di rumah sebagai guru mengaji. Beliau setiap hari naik sepeda menuju SDN Masimpan dan Mandampa untuk memberikan yang terbaik bagi para siswanya. Saya dan dua adik kandung saya: Nikmah dan Norhalimah berupaya mewarisi kiprah almarhum dengan juga memilih menjadi guru. Ayahanda Haji Baseran mengajarkan kerja keras untuk keluarga sambil memilih jalan hidup asketis. Istriku yang setia mengarungi perjalanan kehidupan sosial dan selalu mengingatkan agar tetap fokus 'menikmati dunia akademik yang sunyi' dengan bersikap optimis. Terima kasih untuk selalu bersama dalam suka dan duka di setiap hitungan detik waktu.

Kepada seluruh keluarga *the Anderus* di Telaga Langsat, Kalimantan Selatan: kedua adik kandungku tercinta: Norhalimah dan Nikmah Khairati dan keluarga, sepupu dan keponakan: Noormadian, Khamsinah, Mukarramah sekeluarga, dan keluarga besar *the Hardjo* Papringan, Boyolali: ayahanda Hardjo Waridi, Ibunda Sumarti (alm), Mbak Sri, Mas Toto sekeluarga, Mbak Utami dan keluarga, Lestari Harjanto sekeluarga. Mereka semua adalah 'mata air' yang jernih, kompas moral perjalanan kehidupan sosial saya. Hari ini sebuah kehormatan yang tak terkira: kedua Bapak saya: Pertama,

ayahanda Haji Baseran –meskipun dalam kondisi kurang sehat- dapat hadir langsung menyaksikan anaknya dikukuhkan menjadi Guru Besar. Beliau tiba langsung dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk menghadiri peristiwa yang pasti tidak pernah terbayangkan akan terjadi ketika ayahanda seringkali mengantar saya naik sepeda motor dari desa Telaga Langsat ke Angkinang atau kota Kandangan, untuk selanjutnya saya naik angkutan umum menuntut ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru. Kedua, Bapak mertua saya, Hadjo Waridi juga hadir langsung. Bapak mertua mengajarkan ketekunan dan jiwa sosial dalam ekspresi wajah yang teduh.

Menutup pidato ini, saya ingin mengajak Bapak/Ibu mengingat kembali nasehat filsuf muslim Al-Ghazali dalam kitabnya: Ihya Ulumuddin Juz. 2 hal. 238:

ما فسدت الرعية إلا بفساد الملوك وما فسدت الملوك إلا بفساد العلماء

"…Tidaklah terjadi kerusakan Rakyat (warga negara) itu kecuali disebabkan oleh kerusakan penguasa (politik), dan tidaklah rusak para penguasa (politik) kecuali disebabkan kerusakan para ulama (kaum akademis)". Nasehat ini ditegaskan lagi pada halaman lain kitab yang sama: Ihya' Juz 2 hal. 357 yang secara umum artinya: "…kerusakan rakyat itu terjadi karena kerusakan penguasa, dan rusaknya penguasa itu karena rusaknya para ulama (intelektual). Dan rusaknya para ulama itu karena kecintaan mereka pada harta dan kedudukan…Semoga Allah menolong kita menghindari semua ini."

Mari kita renungkan pemikiran Edward Said di dalam buku Representations of the intellectual (1996):

The intellectual always has a choice either to side with the weaker, the less well-represented, the forgotten or ignored, or to side with the more powerful. Semua kembali kepada pilihan. Selanjutnya, izinkan saya membaca puisi kecil yang saya tulis sendiri berikut ini, dan sebelumnya pernah dibacakan dalam aksi publik keprihatinan kemunduran demokrasi di halaman Gedung Agung Jl. Malioboro, 15 Januari 2024:

PUISI KEMATIAN DEMOKRASI

Ketika Demokrasi hanya sebuah mimpi.
Etika politik dikebiri
Keadaban bernegara telah diingkari
Suara kritis kampus direpresi
Maka, selamat datang rezim otoriter baru, yang melebihi rezim Soeharto.

Ketika demokrasi dibunuh oleh tuannya sendiri
Akal sehat tak lagi bernyawa
Nafsu berkuasa makin digdaya
Keadaban publik tak lagi bertahta
Maka, selamat datang musim gugur demokrasi

Jika demokrasi berarti kebebasan sipil berekspresi dan memilih, kini tak lagi leluasa.
Jika demokrasi adalah pergantian pemimpin setiap lima tahun, ia nyaris tak ada.
Jika demokrasi adalah sikap hormat kepada hak rakyat atas tanahnya, ia-pun kini terlupa.
Jika demokrasi adalah kebebasan akademik, maka ia tak lagi menyala.
Maka, jangan diam. Jangan takut. Lawan dan lawan!

DAFTAR PUSTAKA

Alemdaruglo, A. (2022). The University in the Making of Authoritarian Turkey. *European Journal of Turkish Studies*. Vol. 34.

Alanazi, L. dan Alfaqiri, A. (2018). *The Toxic University: Zombie Leadership, Academic Rockstars and Neoliberal Ideology.* Public Integrity, Vol. 21 (3).

Al-Makin (2018). *Bisakah Menjadi Ilmuwan di Indonesia? Keilmuan, Birokrasi dan Globalisasi.* Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga.

Adiprasetio, J. (2019). Perkembangan Ilmu Komunikasi di Indonesia: Instrumentalisasi Kuasa hingga Mekanisme Pasar. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 6 (2), 124–149

Adiprasetio, J. (2023). *Komunikasi dan Kuasa.* Yogyakarta: Pustaka Cantrik.

Antoni, Alfira, N., Handayani, S. (2019). *Studi Pendekatan Sejarah Komunikasi: Beberapa Catatan Pengelaman Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya*. Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi, *1*(1), 46-52.

Beshyah, S. A. (2017). Fake academia and bogus conferences are on the rise in the middle east: Time to act. *Ibnosina Journal of Medicine and Biomedical Sciences*, *9*(6), 147. https://doi.org/10.4103/ijmbs.ijmbs_61_17

Binangkit, I., & Siregar, D. (2020). Internasionalisasi dan reformasi perguruan tinggi: Studi kasus pada lembaga Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, *4*(2), 131. https://doi.org/10.26740/jdmp.v4n2.p131-138

Birowo, A. (2007). Perlukah Perspektif Asia dalam Kajian Ilmu Komunikasi? Dalam: Manurung, P. (Ed.).

Komunikasi dan Kekuasaan. Yogyakarta: Forum Studi Komunikasi.

Bourdieu, P. (1998). *Homo Academicus.* California: Stanford University Press.

Caranaya, J., Broudy, D., Klaehn, J. (Eds.) (2018). *The Propaganda Model Today: Filtering Perception and Awareness*. London: University of Westminster.

Christensen, G. (2023). Three Concepts of Power: Foucault, Bourdieu and Habermas. *Power and Education*, hal. 1-14

Curran, J., dan Park, M. (2000). *De-Westernizing Media Studies*. London: Routledge.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed). In *SAGE Publications*.

Corona-Sobrino, C., García-Melón, M., Poveda-Bautista, R., & González-Urango, H. (2020). Closing the gender gap at academic conferences: A tool for monitoring and assessing academic events. *PLOS ONE*, *15*(12), e0243549. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243549

Cowan, D. (2016). *Predatory journals, publishers and conferences*. Universiteit Van Pretoria.

Cress, P. E. (2017). Are predatory conferences the dark side of the open access movement? *Aesthetic Surgery Journal*, *37*(6), 734–738. https://doi.org/10.1093/asj/sjw247

Darbyshire, P. (2018). Fake news, fake journals, fake conferences, what we can do. *Journal of Clinical Nursing*, *27*(9–10), 1727–1729. https://doi.org/10.1111/jocn.14214

Downs, D. (2009). *Academic Freedom: What It is, What It is not, and How to Tell the Difference.* The John William Poper Center

Donmez, P., dan Duman, A. (2020). Marketization of Academia and Authoritarian Governments: The Cases of Hungary and Turkey in Critical Perspective. *Critical Sociology*, Vol. 47 (7-8).

Dogan, S., dan Selenica, E. (2022). Authoritarian and Academic Freedom in Neoliberal Turkey. *Globalization, Societies and Education,* Vol. 20 (2).

Eaton, S. (2018). *Avoiding predatory journals and questionable conferences: A resource guide*. University of Calgary. https://doi.org/10.11575/PRISM/20

Edelheim, J. R., Thomas, K., Åberg, K. G., & Phi, G. (2018). What do conferences do? What is academics' intangible return on investment (ROI) from attending an academic tourism conference? *Journal of Teaching in Travel & Tourism*, *18*(1), 94–107. https://doi.org/10.1080/15313220.2017.1407517

Evans, M. (2004). *Killing Thinking*. London: Continnuum

Ferdiansyah, R. (2013). *Kebijakan Liberalisasi Pendidikan Tinggi: Langkah Awal Memanfaatkan Bonus Demografi.* Makalah dalam konferensi nasional "Quo Vadis Developmentalism?", Institute of International Studies, UGM, 7 Desember 2013.

Fleming, P. (2021). *Dark Academia: How University Die*. London: Pluto Press

Freire, P. (2013). *Pendidikan Kaum Tertindas* (Pedagogy of the Oppressed). Jakarta: LP3ES

Godłów-Legiędź, J. (2021). On the Academic Freedom in the Times of Crisis of Liberal Democracy. *Economic and Law*, Vol. 20 (4).

Giroux, H. (1985). Critical Pedagogy and the Resisting Intellectual, Part II. *Phenomenology + Pedagogy*, 3 (2), hal. 84-97

Grim, J. (2017). Free Research in Fearful Times: Conceptualizing an Index to Monitor Academic Freedom. *Interdisciplinary Political Studies,* Vol. 3 (1), 41-75

Hadley, G. (2015). *English for Academic Purposes in Neoliberal Universities: A Critical Grounded Theory*. London: Springer.

Huda, N., Suyanto, Kartogiran B., Setiawan, C., Putranta, H. (2020). Academic Freedom: Understanding and Experience of Higher education Lecturers in Indonesia. *Universal Journal of Educational Research*, Vol. 8 (10).

Humbert, C. dan Joseph, C. (2019). Introduction the politics of resilience: problematising current approaches. *International Policies, Practice and Discourse*, Vol. 7.

Holford, J. et al. (2020). Educational Research in Authoritarian Times. *International Journal of Lifelong Education*. Vol 39 (4).

Hoffman, A. (2016). Reflections: Academia's Emerging Crisis of Relevance in the Consequent Role of the Engaged Scholar. *Journal of Change Management*, Vol. 16 (2)

Habermas, J. (1991). *The structural transformation of public sphere*. MIT Press.

Herman, E. S., & Chomsky, N. (2002). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media*. Pantheon Books.

Hair, A. (2020). Teori Komunikasi Perspektif Indonesia: Gagasan dan Kemungkinan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *4*(2), 115-134.

Haryanto, I. (2001). *Propaganda, Kuasa, dan Pengetahuan*: *Genealogi Ilmu Komunikasi di Indonesia, (Suatu Penelusuran Awal)*. Jakarta: Jaringan Kerja Budaya.

Heryanto, A. (2023). *Universitas*. Jakarta: Kompas.id. Diakses dari: https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/05/universitas.

Heryanto, A. (2024). *Nasib Dosen.* Jakarta: Kompas, 10 Juni 2024.

Hodges, D.C. (2000). Class Politics in the Information Age. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Holbig, H. (2014). Shifting Ideologies of Research Funding. The CPC's National Planning office for Philosophy and Social Science.

Horn, M. (1999). *Academic Freedom in Canada: A History*. Toronto: University of Toronto Press

IAMCR/International Association of Media and Communication Research. (2021). IAMCR Nairobi 2021. In *IAMCR/International Association of Media and Communication Research*. IAMCR/International Association of Media and Communication Research. https://iamcr.org/nairobi2021/online

ICA/International Communication Conference. (2021). 7th Annual ICA Conference. In *ICA/International Communication Conference*. https://icaitb.id/

Irawanto, D. W., Ramsey, P. L., & Tweed, D. C. (2012). Exploring paternalistic leadership and its application to the Indonesian public sector. *International Journal of Leadership in Public Services*, *8*(1), 4–20. https://doi.org/10.1108/17479881211230637

Jessop, B. (2018). On academic capitalism. *Critical Policy Studies*, *12*(1), 104–109. https://doi.org/10.1080/19460171.2017.1403342

Kahan, S., & Kushner, R. F. (2017). New year's resolution: Say no to fake journals and conferences. *Obesity*, *25*(1), 11–12. https://doi.org/10.1002/oby.21738

Karlsohn, T. (2016). The academic seminar as emotional community. *Nordic Journal of Studies in*

Educational Policy, *2016*(2–3), 33724. https://doi.org/10.3402/nstep.v2.33724

Kuhn, T. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. London: The University of Chicago Press

Kurzman, C. dan Owens, L. (2002). The Sociology of Intellectuals. *Annual Review of Sociology*, Vol. 28.

Kinzelbach, K., Lindberg, S. dan Lott, L. (2024). *Academic Freedom Index 2024*. Diakses dari laman: https://www.v-dem.net/our-work/research-programs/academic-freedom/)

Lantowa, J., Marahayu, N. mega, & Khairussibyan, M. (2017). *Semiotika: Teori, metode, dan penerapannya dalam penelitian sastra*. Deepublish.

Lay, C. (2019). Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Politik UGM, 6 Februari 2019).

Landy, D., Lentin, R., McCarthy, C. (2020). *Enforcing Silence: Academic Freedom, Palestine and the Criticism of Israel.* London: Zed Books.

Lestari, D. (2015). Pengembangan kinerja dan karier akademik. *Jurnal Kinerja*, *12*(2), 71–83. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/7

Levitsky, S. dan Way, L. (2002). Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism. *Journal of Democracy*, Vol. 13 (2).

Lojdova, K. (2016). The End of Academic Freedom in the era of Neoliberalism? Pedagogicka Orientace, Vol. 26 (4), 605-630

Marginson, S. (2011). Higher Education and Public Good. *Higher Education Quarterly*, Vol. 64 (4), 411-433.

Masduki. (2015). Kurikulum Komunikasi dan Jurnalistik Dakwah: Perbandingan dan Rekomendasi Pembaruan. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 4 (1), hal. 95-114.

Masduki (2022). *Political Economy of Communication Conference*. Jurnal Komunikator, Vol. 14 (1).

Masduki (2022). *The Dark Side of Communication Studies in Higher Education of Indonesia.* Jurnal Aspikom, Vol. 7 (2).

Masduki. (2022). Cyber-troops, Digital Attacks, and Media Freedom in Indonesia. *Asian Journal of Communication*, Vol. 32 (3).

Marcuse, H. (2002), *One-Dimensional Man*. New York: Routledge.

Marini, G. dan Oleksiyenko, A. (2022). Academic Freedom and Re-imagined Post-Humboldtian Europe. *Higher Education Quarterly,* Vol. 76.

Mill, J. (2001). *On Liberty*. Ontario Kitchener: Botoche Books.

MacKenzie. (2019). *Inside a "Fake" conference: A journey into predatory science*. Www.Technologynetworks.Com. https://www.technologynetworks.com/tn/articles/inside-a-fake-conference-a-journey-into-predatory-science-321619

Mali, M. G. (2020). Internasionalisasi kampus sebagai strategi perguruan tinggi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, *2*(1), 68–78.

McCrostie, J. (2018). *Predatory conferences: A case of academic cannibalism*. Diakses dari laman: www.Exordo.Com. https://www.exordo.com/blog/9-signs-this-is-a-fake-conference/

McQuail, D. (1983). Mass communication theory an introduction. *SAGE Publications*.

Munadi (2023). Privatisasi Perguruan Tinggi Negeri: antara pengingkaran kewajiban konstitusi, kebebasan akademik dan tuntutan pasar. Pidato Pengukuhan Guru Besar Manajemen Pendidikan, UIN Surakarta.

Mulyana, D. (2010). *50 Tahun FIKOM: Kilas Balik, Kekinian dan Impian*. Bandung: FIKOM Universitas Padjadjaran.

Murove, M. (2018). Academic Freedom and the Problem of Patriotism and Social Responsibility in post-Colonial Africa. Alternation Special Edition (23)

Nazaruddin, M., & Ningsih, I. (2018). Communication Theory Teaching and the Challenges of Dewesternization of Communication Theories. *Asian Journal of Media and Communication*, *2*(1), 1-14.

Nugroho (2012). Negara, Universitas dan Banalitas Intelektual (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi, UGM, 14 Februari 2012)

Utari, P., Arifin, H., & Hermawati, T. (2012). Pengembangan Kajian Teori Komunikasi Berperspektif Keindonesiaan. *Jurnal Komunikasi Massa*, 1-21.

Perry, E. (2019). Educated acquiescence: How Academia Sustains Authoritarianism in China. *Theory and Society.* Vol. 49, hal. 1-22.

Prahani, dkk. (2020). The Concept of Kampus Merdeka in Accordance with Freire's Critical Pedagogy. *Studies of Philosophy of Science and Education*, *1*(1), 21-37.

Power, T. dan Warburton, E. (2020). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute

Prasetyo, E. (2024). *Kampus Hari ini: Mahal, Menindas dan Kehilangan Integritas*. Yogyakarta: Intrans Publishing.

Rahardjo, T. (2009). *Cetak Biru TeorI Komunikasi di Indonesia*. Salatiga: Seminar Arah Depan Pengembangan Ilmu Komunikasi di Indonesia.

Rahardjo, T. (2012). Keseragaman Atau Keberagaman: Gagasan Alternatif untuk Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi di Indonesia. Dalam: Setio Budi (Ed.), *Communication Review*: *Catatan Tentang Pendidikan Komunikasi di Indonesia, Jerman dan Australia*. Yogyakarta: Buku Litera.

Ramos, V. (1982). The Concepts of Ideology, Hegemony and Organic Intellectuals in

Gramsci's Marxism. *Theoretical Review*, No. 27. https://www.marxists.org/history/erol/periodicals/theoretical-review/1982301.htm

Rangel, N. (2019). *Public Intellectuals in the era of Privatization: An Examination of Academic Freedom and its Protection of Dissident Scholars at US Public Universities.* Berkeley: PhD Thesis University of California.

Rakhmani, I., & Siregar, F. (2016). *Reforming Research in Indonesia: Policies and Practices*. Jakarta: Global Development Network.

Rakhmani, I, dkk. (2024). Reflecting on Indonesia's young academy movement. PNAS Perspective. Diakses dari: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2307213121

Rosser, A. (2021). Higher Education in Indonesia: The Political Economy of

Institution-Level Governance. *Journal of Contemporary Asia.* DOI: 10.1080/00472336.2021.2010120.

Rowe, N. (2018). 'When you get what you want, but not what you need': The motivations, affordances and shortcomings of attending academic/scientific conferences. *International Journal of Research in*

Education and Science (IJRES), *4*(2), 714–730. https://doi.org/10.21890/ijres.438394

Roberts, M. (2018). *Censored: Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall*. Princeton: Princeton University Press

Said, E. (1996). *Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures.* New York: Vintage.

Sá, M. J., Ferreira, C. M., & Serpa, S. (2019). Virtual and face-to-face academic conferences: Comparison and potentials. *Journal of Educational and Social Research*, *9*(2), 35–47.

Sasse, B. (2023). *The moral decline of elite universities.* Diakses dari laman: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/12/interesectionality-american college/676350/

Serpa, S., dan Ferreira, C. (2019). The Concept of Bureaucracy by Max Weber. *International Journal of Social Science Studies,* Vol. 7 (2).

Surya, P. (2021). Kritik terhadap internasionalisasi pendidikan tinggi ala kebijakan politik the New Southbound Taiwan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *9*(2), 203–212. https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jamp.v9i2.42586

Seggie, F., dan Gokbel, V. (2014). *From Past to Present: Academic Freedom in Turkey*

Istanbul: SETA

Schumpeter, J. (1934). *Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*. Boston: Harvard University Press.

Schulze-Cleven, T., Reitz, T., Messe, J., dan Angermuller, J. (2017). The new political economy of higher education: Between distributional conflicts and discursive stratification. *High Educ*, Vol. 73, hal. 795-812

Schleck, J. (2022). *Dirty Knowledge: Academic Freedom in the Age of Neoliberalism.* University of Nebraska.

Situmorang, M. (2022). *Melihat Perguruan Tinggi secara Positif*. Kompas, 19 Februari 2022.

Sultana, F. (2018). The False Equivalence of Academic Freedom and Free Speech: Defending Academic Integrity in the Age of White Supremacy, Colonial Nostalgia, and Anti-Intellectualism. *ACME: International Journal for Critical Geographies*. Vol. 17 (2).

Sudibyo, A. (2004). Absennya Pendekatan Ekonomi Politik untuk Studi Media. Dalam: Prajarto, N. (Ed.), *Komunikasi, Negara dan Masyarakat*. Yogyakarta: FISIP UGM.

Smith, J. (2017). *Toxic University, Zombie Leadership, Academic Rockstar*. London: Springer

Wahyono, B. (2024). *Sosiologi Berparadigma Kritis Sebagai Penyubur Ketandusan Habitat Epistemologi Ilmu Pendidikan di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta.

Wasis, B., Wiratraman, H., dan Widjono, R. (2020). *Peranan Kebebasan Akademik dalam Penyelamatan Sumberdaya Alam dan Antropologi Budaya Lokal.* Makalah Diskusi di Program Pascasarjana, Program Studi Silvikultur Tropika, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, April 2020.

Wiratraman, H. (2022). Marginalised academics under Joko Widodo's authoritarian Politics. Dalam: Al Khanif dan Khoo Ying Hooi (Ed.), *Marginalisation and Human Rights in Southeast Asia*. New York: Routledge.

Xiaojun, Y. (2014). Engineering Stability: Authoritarian Political Control over University Students in Post-Deng China. *The China Quarterly,* Vol. 218 (1).

Yang, G. (2011). *The Power of The Internet in China: Citizen Activism Online.* New York: Columbia University Press.

Yudiatmaja, W. (2015). *Toward Liberalism: The Practice of Liberalization in Indonesian*

Higher Education. Kuala Lumpur: Conference paper 1st World Islamic Social Science Congress.

Lampiran:

Pelaksanaan pameran arsip Museum Pers dengan fokus Harian Kedaulatan Rakyat, sebagai rangkaian pengukuhan Guru Besar bidang media dan jurnalisme, selasar utara Perpustakaan Pusat, Kampus Terpadu UII, antara 25 Juni-16 Juli 2024**.**

KAMIS PON, 20 JUNI 2024 (12 BESAR 1957)

LINGKAR YOGYA

"KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 9

Pameran Arsip Pers KR di UII

SEBAGAI rangkaian mangayubagyo pengukuhan Guru Besar Prof Dr Masduki serta peryaan ke-20 Jurusan Ilmu Komunikasi UII, akan digelar pameran perdana arsip pers. Kegiatan sebagai bagian kolaborasi akademisi, seminan dan jurnalis akan diselenggarakan di Selasar Perpustakaan Pusat Gd Moh Hatta UII Jl Kaliurang KM 14,5 pada 25 Juni - 16 Juli 2024.

Dosen Ilmu Komunikasi Prof Dr Masduki mengemukakan hal tersebut kepada media, Selasa (18/6). Pameran akan dibuka Selasa (25/6) siang oleh Rektor UII Prof Fathul Wahid PhD, sesi pengukuhan Prof Dr rer Soc Masduki sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSSB) dan Prof Dr Tamyiz Mukharom sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ushul Fikih FIAI.

Pameran merupakan kolaborasi Masduki sebagai inisiator dengan seniman seniman Anang Saptoto sebagai kreator karya sekaligus kurator. Selain pameran, Prof Masduki juga akan meluncurkan buku "Negara, Media dan Jurnalisme Indonesia pasca-Orde Baru' yang diterbitkan Kompas Gramedia.

"Pameran akan menyuguhkan pelbagai dokumentasi Harian Kedaulatan Rakyat yang kita kenal juga dengan nama *KR*, satu di antara surat kabar legendaris dan tua usianya, dalam bentuk karya seni fotografi. Dengan mengambil tema 'Transisi Politik Indonesia : 1945 1949 1965 1998 2012," jelas Masduki. KR yang lahir 27 September 1945 lanjut Dosen FPSSB UII telah merekam perubahan politik Indonesia pasca-kolonial, Jepang hingga pasca-reformasi 1998.

Mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa Kedaulatan Rakyat? Menurut Masduki cukup mudah menjelaskan, yakni KR adalah Yogya dan Yogya adalah miniatur Indonesia. "Argumen ini menjadi dapat kita balik. Indonesia adalah Yogya dan Yogya ada di lembaran-lembaran koran KR," sebut Dosen, Guru Besar Ilmu Media dan Jurnalisme yang aktnsb disapa Ading.

Sebagai koran nasional tertua pascakemerdekaan di Yogyakarta bahkan di Indonesia, KR menurut Ading menggambarkan dirinya sebagai ruang kolektif dinamika politik, bisnis, partisipasi warga negara. Dalam batas tertentu, sebutnya menjadi potret dinamika editorial redaksi, bisnis media lokal dan keterlibatan warga Yogya di dalamnya sebagai konsumen, pembaca, pengisi kolom opini, sumber berita.

"KR adalah ruang publik yang menyuguhkan *public good*, ketika media masih era konvensional. KR membuktikan bahwa *good content* menimbulkan efek loyalitas, bahkan pengutan brand hingga menjadi legenda. KR adalah legenda model bisnis jurnalisme lokal yang khas dengan pendanaan yang klasik. KR adalah juga kerja seni mengelola komunikasi publik antara otoritas dan warga dalam bingkai informasi," tambah Guru Besar Ilmu Komunikasi UII tersebut.

Dengan slogan koran *Mijamasi Tumraping Liyan* juga slogan sebuah *koran adalah sebuah kepercayaan*, Kedaulatan Rakyat membuktikan (petikan iklan KR di radio siaran). KR menurut Masduki telah menjadi *the living museum*. "Pameran ini hanya membuktikannya, merefleksi ulang karya liputan KR sepanjang periode transisi republik. Menyejajarkannya kembali dalam kerangka yang kolaboratif akademik, artistik, jurnalistik," jelas Masduki. (Fsy)-f

KR-istimewa

Poster pameran arsip museum pers Jogjakarta.

Peluncuran buku, sebagai rangkaian pengukuhan Guru Besar bidang media dan jurnalisme, di selasar utara Perpustakaan Pusat, Kampus Terpadu UII, 25 Juni 2024. Buku ini menyajikan kompilasi pemikiran saya terkait media dan jurnalisme dalam kurun waktu 20 tahun terakhir pasca reformasi 1998 (diterbitkan Kompas, Juni 2024)

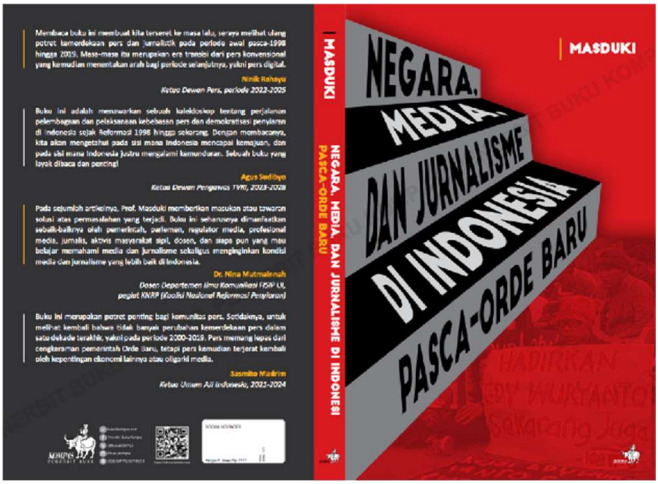

pr2media
PEMANTAU REGULASI & REGULATOR MEDIA
MEDIA REGULATION AND REGULATOR WATCH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Prof. Dr.rer.soc Masduki, S.Ag., M.Si.

IDENTITAS DIRI

Nama lengkap	**Masduki**
Jabatan	***Professor*** (Guru Besar) dalam Kajian Media dan Jurnalisme Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, INDONESIA (website: www.uii.ac.id). *(sejak 1 Oktober 2023: SK. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, No. 63634/M/07/2023)*
Kualifikasi	**Dr.rer.soc.** *(rerum socialium/social science)* Lulusan dari *Institute of Communication and Media Studies,* University of Munich, Jerman (certificate issued by January, 2021)
Alamat kantor	Jurusan/Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, INDONESIA, Kode Pos 55584
Alamat E-mail	masduki@uii.ac.id

ID Publikasi	SCOPUS: 57193158200 SINTA: 6200334
Alamat Rumah	***nDalem Manis***, Jalan Lempongsari Raya, Gang Masjid Annur No. 88B, Jongkang Baru RT. 9 RW. 37, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, INDONESIA 55581
Keluarga	Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE, MM (Istri) Haji Baseran (Ayah) Siti Khadijah (Ibu, *almarhumah*) Nikmah Khairati, S.Pd. (Adik Kandung) Noorhalimah, S.Pd. (Adik Kandung)
Minat studi dan kepakaran	1. Media dan Politik, Jurnalisme Digital, Ekonomi Politik Media, 2. Lembaga Penyiaran Publik, Perbandingan Sistem Media, 3. Kebijakan dan Regulasi Media, Aktivisme Media/Digital.

RIWAYAT PENDIDIKAN

	SD	**SMP**	**SMA**
Nama Sekolah	Sekolah Dasar Negeri Kec. Telaga Langsat, Kandangan, Kalimantan Selatan	Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Falah, Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Madrasah Aliyah Negeri, Pondok Pesantren Al-Falah, Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Tahun	1979-1985	1985-1991	

	S1	S2	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Sarjana Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Magister Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta	Master in Jurnalism Ateneo de Manila University, Manila, Filipina	Dr.rer.soc, Institute of Communication Studies and Media Research (IfKW), University of Munich, Germany.
Tahun	1992-1999	2001-2003	2004-2006	2015-2019
Judul Tugas Akhir/Tesis/Disertasi	Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Rubrik Fadhilah Jum'at, Harian Bernas, Desember 1997-November 1998.	Reformasi Sistem Penyiaran di Indonesia: Studi Pembahasan dan Penetapan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.	The Defamation Case: A Big Test for Press Freedom and Democracy in Indonesia and Thailand.	Public Service Broadcasting and Post-Authoritarian Indonesia (Palgrave Mcmillan, London, 2020).

PENGALAMAN AKADEMIK DAN PROFESIONAL MEDIA

Jabatan	Instansi	Tahun
Dosen Tetap	Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia	2004-sekarang
Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi	Universitas Islam Indonesia	2024-sekarang
Kepala Pusat Penelitian	Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, DPPM Universitas Islam Indonesia	2022-sekarang
Kepala Humas	Universitas Islam Indonesia	2013-2014

Peneliti	Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, Universitas Gadjah Mada, bidang Media dan Resolusi Konflik	2009-2013
Kaprodi Ilmu Komunikasi	Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia	2004-2010
Dosen Tamu	Mata kuliah: Jurnalistik Radio, Produksi Program Siaran, Etika Media Penyiaran di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, FISIP Universitas Atmajaya Yogya, FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, STMM Multimedia Training Center Yogyakarta, dan STIKOM/AKINDO Yogyakarta.	2001-2009
Dosen	Mata kuliah: Profesionalisme dan Etika Profesi pada program Magister Farmasi, Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia	2024
Dosen Tamu	Program Magister Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Penguji tesis pada Program S-2 Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya	2024
Expert Lecturer	International Faculty Exchange Program (IFEP), Chandigarh University, India (Invited expert lecturer).	Upcoming July-October 2024
Dosen Tamu (*Visiting Lecturer)*	School of Creative Industry and Media Performing Arts (SCIMPA), Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia. Mata kuliah: Digital Media, Regulasi dan Etika dalam Industri Kreatif	01 November 2023-29 Februari 2024

Peneliti Tamu *(Visiting Lecturer)*	Cracow University of Economic (CUE), Krakow, Polandia, dalam proyek kolaborasi 3 tahun skema ODDEA European Union-Universitas Islam Indonesia: *The overcoming digital divide within the European and Southeast Asia*	18 Juni-17 Juli 2023
Dosen Tamu (*Visiting Lecturer)*	Nanjing Xiaozhuang University, China, mata kuliah: Media and Globalization	November-Desember 2021
AMBASSADOR/Indonesian Representative	International Association of Media and Communication Research (IAMCR) for Indonesia	2024-2027
Asesor Nasional	Akreditasi Jurnal SINTA (bidang substansi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia	2023-sekarang
Asesor Beban Kinerja Dosen (BKD)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia	2021-sekarang
Konsultan Ahli Media (*Indonesian media expert*)	Proyek riset UNESCO dan Public Media Alliance (PMA), London terkait dampak COVID-19 terhadap kebebasan pers dan keamanan jurnalis di Asia Tenggara.	2021
Konsultan	UNESCO Jakarta dalam pengembangan kerangka kerja Media Diversity Monitoring Framework (MDMF) untuk Indonesia, bagian dari agenda Millennium Development Goals/MDGs Indonesia	2020-2021
Assessor Indonesia	International Fact-Checking Network (IFCN), Poynter Institute, Columbia, USA	2017-2020
Direktur Program dan Produksi	Kantor Pusat Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta, Indonesia	2010-2012

Manajer SDM, Riset, dan Berita	PT. Radio Prima UNISI Yogyakarta	2006-2010
Radio *Trainer* dan Konsultan Media	NGO seperti antara lain Care International, LP3Y, PRSSNI Pusat, KBR68H Jakarta, Combine Resource Institution, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dll.	2001-2010

PENGALAMAN MEMBIMBING/MENGUJI DISERTASI (S-3)

Posisi	Instansi	Tahun
Penguji dan Pembimbing Disertasi	Departemen Ilmu Komunikasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Salemba Jakarta	2021-sekarang
Penguji Disertasi	Departement of Media and Communication Studies, Faculty of Art and Social Sciences, University Malaya, Malaysia	2021-2022
Penguji (Proposal) Disertasi	Fakultas Ilmu Komunikasi, Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung Jawa Barat	2021-sekarang
Penguji dan Pembimbing Disertasi	Program Doktor Ilmu Hukum, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	2024-sekarang
Penguji Disertasi	Program Doktor Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah	2024-sekarang
Penguji/*external reviewer* disertasi	Department of Gender, Media and Culture, College of Asia and the Pacific, Australian National University	2024

PENGALAMAN ORGANISASI SOSIAL DAN ADVOKASI

Posisi	Instansi	Tahun
Ketua	Pemantau Regulasi dan Regulator Mediaorganisasi nasional non-profit untuk advokasi kebijakan media dan regulator media di Indonesia (berdiri tahun 2010). Profil mendetail terdapat pada situs ini: www.pr2media.or.id. Tahun 2010-2019: saat menjadi Wakil Ketua PR2Media, antara lain turut merumuskan draf revisi Undang-Undang Penyiaran versi publik	2020-sekarang
Inisiator	Forum Cik Ditiro. Forum masyarakat sipil multi-sektor di DIY untuk gerakan pro-demokrasi dalam Pemilu, anti-politik dinasti, dll	2023-sekarang
Ketua Departemen Kominfo danTransformasi Digital	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	2021-sekarang
Wakil Ketua	Asosiasi Akademisi Komunikasi Indonesia untuk Pengendalian Tembakau	2022-sekarang
Tim Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, pada Komisi Informasi Daerah, Provinsi DIY	2022-2023
Tim Juri Nasional Penghargaan Tahunan Udin Award	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta	2023
Koordinator	Koordinator Koalisi Kebijakan Sleman Sehat (KKSS), advokasi perumusan dan penetapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kab. Sleman. Anggota ***Tim Perumus Raperda*** Kawasan Tanpa Rokok Kab. Sleman, 2023.	2022-sekarang
Pendiri dan Mentor	Akademi Media Publik sekolah media publik untuk profesional dan aktifis media di Indonesia, berbasis di Yogyakarta	2020-sekarang
Pendiri	Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP) organisasi non-profit untuk advokasi	2013-sekarang

	kebijakan dan penguatan manajemen lembaga penyiaran publik di Indonesia: www.penyiaranpublik.org., antara lain merumuskan draf Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia versi publik.	
Ketua	Klinik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Universitas Islam Indonesia, kerjasama Jurusan Ilmu Komunikasi- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Yayasan Tifa, Open Society Foundation, Jakarta	2009-2011
Anggota	Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen, AJI Indonesia (3 periode). Supervisi penegakan kode etik jurnalistik bagi anggota AJI seluruh Indonesia	2006-2014
Anggota	Koalisi Independen Demokratisasi Penyiaran (KIDP) turut sebagai pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal yang berpotensi monopoli kepemilikan media di UU No. 32/2002	2008-2012
Wakil Ketua	Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta, organisasi non-profit untuk gerakan media literasi dan advokasi kebijakan media	2005-2015
Ketua	Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Cabang Yogyakarta	2001-2003

BEBERAPA PENELITIAN TERBARU

2023-2024 Worlds of Journalism Study, survei budaya jurnalistik dunia, selaku prinsival investigator untuk Indonesia. Didanai oleh University of Munich, Jerman, UNESCO dan International Federation of Journalists.

2024 Kebebasan Akademik Ilmu Komunikasi di Indonesia (Sejarah, Regulasi dan Kasus). Hibah riset internal Program Studi Ilmu Komunikasi UII

2023 Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia. PR2Media dan Project USAID-Internews Media Program, Jakarta, Indonesia.

2023 Pengaturan Konten Berbahaya dan Ilegal di Media Sosial di Indonesia. PR2Media dan Yayasan Tifa/OSF,

	Jakarta Indonesia.
2023	Aktivisme Digital untuk Kebebasan Pers di Indonesia. Hibah riset internal Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia
2023	Dewan Pers di Indonesia: Sejarah, Struktur dan Tata Kelola. Hibah internal Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia.
2022	Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan dan Urgensi Protokol Keamanan Jurnalis di Indonesia. Kerjasama PR2Media-AJI Indonesia dan International Media Support (IMS), Copenhagen, Denmark.
2022	Keberlangsungan Media Massa di Indonesia Pasca Pandemi COVID-19. Hibah riset internal DPPM, Universitas Islam Indonesia.
2021	Principal Investigator, Survei Nasional Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan di Indonesia. Kerjasama PR2Media-USAID Internews Media Program, Jakarta.
2021	Survei Data Pers di Indonesia. Kerjasama Dewan Pers, Jakarta-Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia.
2020	Model Kebijakan Pelarangan Iklan Rokok di Media Digital di Indonesia. Didukung ITCRN-PEBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.
2017	Perumusan Model Tata Kelola RTRI berbasis Riset untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Penyempurnaan Draf RUU RTRI versi Publik. Kerjasama Tifa Foundation/OSF, Jakarta dan Rumah Perubahan LPP, Yogyakarta.
2016	Kampanye dan Advokasi Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) di DPR Berbasis Masyarakat Sipil. Kerjasama Tifa Foundation/OSF, Jakarta dan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP), Yogyakarta.
2015-skrg	Studi Jurnalistik Dunia (World of Journalism Study/WJS). Selaku princival investigator untuk Indonesia, diselenggarakan oleh Institute of Communication Studies and Media Research (IfKW), University of Munich, Jerman. Dua kali survei nasional di 30 provinsi: budaya kerja jurnalis Indonesia.
2015	Pengembangan Model dan Implementasi Audit RRI-TVRI

Berstandar Penyiaran Profesional. Riset dan advokasi kebijakan penyiaran kerjasama Tifa Foundation/OSF, Jakarta dan Rumah Perubahan LPP, Yogyakarta.

2014 Akselerasi Transformasi Lembaga Penyiaran Publik Melalui Riset dan Penyusunan Draft RUU Penyiaran Publik Versi Publik. Kerjasama Tifa Foundation/OSF, Jakarta dan Rumah Perubahan LPP, Yogyakarta.

2014 Independensi Pers Lokal di Indonesia dalam Pemilu 2014. Kerjasama Dewan Pers Jakarta dan Masyarakat Peduli Media, Yogyakarta**.**

PUBLIKASI JURNAL INTERNASIONAL

Tahun	Judul	Penerbit	Indeksasi
2023	Between State Funding and Volunteerism: The Survival Strategies of Indonesian Community Radio Network (Single author)	*Radio Journal. International Studies in Broadcast and Audio Media, Vol. 21(2), 221-236* https://intellectdiscover.com/content/journals/10.1386/rjao_00084_1	(2023) Scopus Q-1 Culture Studies https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100200635&tip=sid&clean=0
2023	'Polite Watchdog: Kompas and Watchdog Journalism in Indonesia (2nd author)	*The International Journal of Press/Politics.* Published online 29 August 2023. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/19401612231196155	(2023) Scopus Q-1 Communication (SJR 2,41) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=10300153306&tip=sid&clean=0
2023	How do national laws filter down to the local? Tobacco control regulation and smoke-free areas in a decentralized Indonesia (2nd author)	*Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol. 42, (2), 216-241* https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/18681034231185159	(2023) Scopus Q-1 Communication (SJR 0,58) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19900190213&tip=sid&clean=0

2023	Women entrepreneurs' struggles during the COVID-19 pandemic and their use of social media (2nd author)	*Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 12 (51), 1-17* https://ideas.repec.org/a/spr/joiaen/v12y2023i1d10.1186_s13731-023-00322-y.html	(2023) Scopus Q-1 Communication (SJR 0,96) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100901140&tip=sid&clean=0
2022	Cyber-troops, digital attacks, and media freedom in Indonesia (Single author)	*Asian Journal of Communication,* Vol. 32 (3), 2018-233 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01292986.2022.2062609	(2022) Scopus Q-1 Communication (SJR 0,63) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17730&tip=sid&clean=0
2022	The Politics of International Broadcasters: A Comparison Between Indonesia and Australia (Single author)	*International Communication Gazette,* Vol. 84 (7-8), 1-20 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/17480485221097962	(2022) Scopus Q-1 Communication (SJR 0.77) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4700152207&tip=sid&clean=0
2022	Radio Broadcasting and Indonesian Nationalism: During the Last Decade of Dutch Colonialism (2nd author)	*Journal of Radio and Audio Media*, Vol. *29*(1), 104-119 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19376529.2022.2035730	(2022) Scopus Q-2 Communication (SJR 0.30) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19900191761&tip=sid&clean=0
2022	Between Post-Autocratic and Post-War Broadcasters: Comparing Public Radio in Indonesia and Germany (Single author)	*Journal of Radio and Audio Media,* Vol. *29*(1), 156-172 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19376529.2022.2045296	(2022) Scopus Q-2 Communication (SJR 0.30) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19900191761&tip=sid&clean=0

2022	Concentration of Media Ownership in Indonesia: A Setback for Viewpoint Diversity (1st author)	*International Journal of Communication,* Vol. 16, 2239-2259 https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/17769	(2022) Scopus Q-1 Communication (SJR 0.75) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100202907&tip=sid&clean=0
2023	The Influence of Japanese Colonialism on Post-Independence Indonesian Radio (Single author)	*Media History*, Vol. 29 (1), 1-14 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13688804.2022.2048640	(2021) Scopus Q-2 Culture Studies (SJR 0.17) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5700165111&tip=sid&clean=0
2021	Media Control in the Digital Politics of Indonesia (Single author)	*Media and Communication,* Vol. *9*(4), 52-61 https://doi.org/10.17645/mac.v9i4.4225	(2021) Scopus Q-1 Communication (SJR 0.90) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100792085&tip=sid&exact=no
2021	Pandemic politics and communication crisis: How social media buzzers impaired the lockdown aspiration in Indonesia (4th author)	*SEARCH Journal of Media and Communication Research*, Vol. *13*(1), 31-46 https://fslmjournals.taylors.edu.my/?s=Pandemic+politics+and+communication+crisis	(2021) Scopus Q-2 Culture Studies (SJR 0.20) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100220154&tip=sid&clean=0
2021	The impact of COVID-19 on Media Freedom, Journalist Safety and Media Viability in Southeast Asia (Indonesian section author)	*Public Media Alliance, London, UK* *https://www.publicmediaalliance.org/wp-content/uploads/2022/01/2021_SEA-PMA-UNESCO-ADN-Report.pdf*	UNESCO-funded research report for Public Media Alliance (PMA), 2021

2020	Blunders of Government Communication: The Political Economy of COVID-19 Communication Policy in Indonesia (Single author)	*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. *24*(2), 97-111 doi: 10.22146/jsp.52770	(2021) Scopus Q-3 Sociology and Political Science, sejak 2019 (SJR 0.17) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101017895&tip=sid&clean=0
2020	Assessing the Role of International Media Assistance in Promoting Public Service Broadcasting in Indonesia (Single author)	*Interactions: Studies in Communication & Culture*, Vol. *11*(2), 177-190 doi: https://doi.org/10.1386/iscc_00017_1	Copernicus & EBSCO https://www.intellectbooks.com/interactions-studies-in-communication-culture
2019	Digital interface in Indonesia's public service broadcasting: Its initiatives and regulatory challenges (Single author)	*Journal of Digital Media & Policy* Vol. *10*(3), 295-309 https://intellectdiscover.com/content/journals/10.1386/jdmp_00004_1	(2021) Scopus Q2 Communication (SJR 0,35) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101041704&tip=sid&clean=0
2017	Political Economy of Sport Broadcasting: Assessing Indonesian PSB Policy on Sport Broadcasting (Single author)	*International Communication Gazette*, Vol. *79*(2), 162-174 http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1748048516689196	(2021) Scopus Q-1 Communication (SJR 0.77) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4700152207&tip=sid&clean=0
2017	In Media We Trust: Journalists and Institutional Trust Perceptions in Post-Authoritarian and Post-Totalitarian Countries (8th author)	*Journalism Studies*, Vol. *18*(5), 1-16 http://dx.doi.org/10.1080/1461670X.2017.1279026	(2021) Scopus Q-1 Communication (SJR 1.76) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700187607&tip=sid&clean=0

2017	Journalism and Islamic Worldview: Journalistic Roles in Moslem Majority Countries (4th author)	*Journalism Studies*, Vol. *18*(5), 1-21 http://dx.doi.org/10.1080/1461670X.2017.1279029	(2021) Scopus Q-1 Communication (SJR 1.76) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700187607&tip=sid&clean=0
2017	Assessing Indonesian Journalist Threats 2010-2015: Cases, Actors and Motives (Single author)	*Media Asia,* Vol. *44*(1), 25-32 https://doi.org/10.1080/01296612.2017.1374627	(2021) Scopus Q-2 Lingustics and Language (SJR 0.20) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=23067&tip=sid&clean=0
2017	Media and Politics: Re-thinking the Indonesian Broadcasting System (Single author)	*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. *21*(1), 14-27 doi: 10.22146/jsp.28680	Scopus Q-3 (2022) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101017895&tip=sid&exact=no
2016	Public Service Broadcasting Regulation in Indonesia: Between Market and Public Interest (Single author)	*I-COME & SHS-Web of Conference 33, 00040(2017).* doi: 10.1051/shsconf/20173300040	https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2017/01/shsconf_icome2017_00040/shsconf_icome2017_00040.html
2015	Journalist in Indonesia: Country Report of the World of Journalism Study (2nd author)	*Worlds of Journalism Study (WJS), Munich, Germany*	https://epub.ub.uni-muenchen.de/view/subjects/15010410.html
2014	Media Conglomeration and Political Intervention in the 2014-General Election (Single author)	*Global Science & Technology Forum (GSTF) Journal of Journalism & Mass Communication,* Vol. 2 (1), 1-13	https://dl6.globalstf.org/index.php/jmc/issue/view/108

PUBLIKASI JURNAL NASIONAL

Tahun	Judul	Penerbit	Index SINTA
2024	Pers Mahasiswa dan Ideologi Gerakan Mahasiswa (ketua penulis)	Jurnal Dewan Pers (accepted, terbit Juli 2024)	https://dewanpers.or.id/publikasi/jurnal
2024	Implementasi Program Advokasi Untuk Mendukung Penetapan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kab. Sleman Yogyakarta (anggota penulis)	Jurnal Neoekohumanika, Vol. 1 (1), 1-13	https://jurnal.ched.itb-ad.ac.id/index.php/juneka
2023	Kontestasi Citra Candi Borobudur di Media dan Jurnalisme Digital: Refleksi atas Jurnalisme Pariwisata	Prosiding Seminar Nasional PPM Universitas Islam Indonesia, ISSN 2963-2277	https://dppm.uii.ac.id/prosiding-seminar-nasional/
2023	Pembuatan Musuem Virtual Sejarah Pembunuhan Wartawan Fuad Muhammad Syafruddin di Yogyakarta	Jurnal Panrita Abdi, Vol. 7 (2), 310-319	SINTA 4 https://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/18373
2023	Organisasi Jurnalis dan Kebebasan Pers di Yogyakarta	Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 20 (1), Juni, pp. 1-20	SINTA 2 https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/878
2022	Literasi Media Publik untuk Pekerja Media melalui Akademi Media Publik	Jurnal WARTA LPM UMS, Vol. 24 (4), 566-575	SINTA 3 https://journals2.ums.ac.id/index.php/warta/article/view/1416

2022	Public Service Broadcasting Model in Indonesian Transitional Society	Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 10 (1), June 2022, pp. 1-13	SINTA 2 http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/35761
2022	The Dark Side of Communication Studies in Higher Education of Indonesia	Jurnal Aspikom, Vol. 7 (2), July 2022, pp. 1-14	SINTA 2 https://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/1127/0
2022	Political Economy of Communication Conferences in Indonesia	Jurnal Komunikator, Vol. 14, No. 1, pp. 1-13. https://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/13751/7341	SINTA 2 https://journal.umy.ac.id/index.php/jkm
2021	Perubahan Pola Kerja Jurnalistik Pasca COVID-19 dan Penurunan Kualitas Berita di Indonesia	Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 19, No. 3, pp. 266-280 http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/5058	SINTA 2 http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/index
2017	Public Broadcasting Reform in the Transitional Society: The Case of Indonesia	Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol. 6, No. 2, pp. 112-119 http://journal.ui.ac.id/index.php/jkmi/article/view/8916	SINTA 2 http://journal.ui.ac.id/jkmi
2013	UU Khusus LPP: Solusi Transformasi RRI-TVRI	Jurnal Komunikasi, Vol. 7. No. 2, 99-112	SINTA 2 https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi
2010	Sinema Independen di Yogyakarta 1999-2008: Idealisme di Tengah Krisis Infrastruktur	Jurnal Komunikasi, Vol. 4, No. 2, 119-130	SINTA 2 https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi
2008	Analisis Model Produksi Berita Televisi Lokal	Jurnal Komunikasi, Vol. 1, No. 1, 101-114	SINTA 2 https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi

2007	Jurnalisme Publik pada Media Penyiaran Publik	Jurnal Komunikasi, Vol. 1, No. 2, 147-154 April 2007	SINTA 2 https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi
2007	Wajah Ganda Media Massa dalam Advokasi Bencana Alam	Jurnal UNISIA, No. 63/XXX/V/2007 Januari-Maret 2007	Google Scholar & Copernicus https://journal.uii.ac.id/Unisia/about
2004	Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia	Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1. No. 1, 145-157	SINTA 2 https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik
2004	Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media dalam Pemilu 2014	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, JSP UGM, Vol. 8, No. 1, 75-90	SINTA 1 https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11059

PUBLIKASI BUKU NASIONAL

Tahun	Judul	Penerbit
2024	Negara, Media dan Jurnalisme di Indonesia Pasca Orde Baru (penulis tunggal)	Kompas Gramedia, Jakarta
2023	Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia (ketua penulis),	Penerbit PR2Media, Yogyakarta, Indonesia
2023	Dari Penyiaran ke Media Publik: 10 Tahun Rumah Perubahan LPP (penulis kedua)	Penerbit Hikam Media, Yogyakarta
2023	Radio Siaran di Indonesia: Menuju Era Konvergensi (anggota penulis)	Penerbit Hikam Media, Yogyakarta
2023	Regulasi Komunikasi: Konsep dan Kasus (buku ajar, penulis tunggal)	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
2022	Dari Munich ke Cologne: Academic Traveller's Note in Germany (penulis tunggal)	Penerbit Hikam Media, Yogyakarta
2022	Ekonomi Politik Media (buku ajar)	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
2021	Artikel dalam buku: Demokrasi Tanpa Demos, Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik, berjudul: *Independensi Media dan Kuasa Uang*	Penerbit LP3ES Jakarta

2021	Sosiologi Komunikasi (buku ajar)	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
2021	Artikel dalam buku: Melawan Otoritarianisme Kapital: Amir Effendi Siregar dalam Pemikiran dan Gerakan Demokratisasi Media di Indonesia, berjudul: *AES dan Pemikiran Penyiaran Publik di Indonesia*. Yogyakarta	PR2Media, Serikat Perusahaan Pers dan Jurusan Ilmu Komunikasi UII
2021	Jurnalis di Indonesia: Antara Otonomi dan Intervensi (penulis pertama)	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
2020	Kebijakan Media dan COVID-19 (editor)	Penerbit PR2Media, Yogyakarta, Indonesia
2017	Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia (penulis tunggal)	Penerbit Rumah Perubahan LPP dan Yayasan Tifa, Jakarta
2016	Penyiaran Publik: Regulasi dan Implementasi (penulis tunggal)	Penerbit Rumah Perubahan LPP dan Yayasan Tifa, Jakarta
2015	SAVE RRI-TVRI: Inisiatif Masyarakat Sipil untuk Transformasi Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia	Penerbit Rumah Perubahan LPP Yogyakarta
2007	Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal (penulis tunggal)	Penerbit Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta
2007	Radio Komunitas: Belajar dari Lapangan (penulis tunggal)	World Bank, kantor perwakilan Jakarta, Indonesia
2004	Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik (penulis tunggal)	UIIPress
2003	Radio Siaran dan Demokratisasi di Indonesia	Jendela, Yogyakarta
2001	Jurnalistik Radio: Menata Profesionalisme Penyiar dan Reporter (penulis tunggal)	LKiS Yogyakarta (karya buku pertama, berbasis pengalaman).

PUBLIKASI BUKU INTERNASIONAL

Tahun	Jenis Publikasi	Judul	Penerbit
2020	*Full Book*	Public Service Broadcasting and Post-Authoritarian Indonesia	Palgrave MacMillan, London https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-7650-8
2021	*Book Chapter*	The Politics of Disinformation in Indonesia (2014-2019). In Politics of Disinformation: The Influence of Fake News on the Public Sphere, First Edition. Guillermo López-García, Dolors Palau-Sampio, Bella Palomo, Eva Campos-Domínguez, and Pere Masip	John Wiley & Sons, Inc., Hoboken USA: https://www.wiley.com/en-us/Politics+of+Disinformation-p-9781119743231
2022	*Chapter report*	The Impact of COVID-19 on Media Freedom, Journalist Safety and Media Viability in Southeast Asia: Indonesia	London: Public Media Alliance, Asia Democracy Network and UNESCO. Link:https://www.publicmediaalliance.org/wp-content/uploads/2022/01/2021_SEA-PMA-UNESCO-ADN-Report.pdf
2024	*Book Chapter (upcoming publication)*	Social Media, Electoral Politics, and Political Personalization in Indonesia.	Routledge - Book Elections and Social Networks around the World, London
2024	*Book Chapter (Upcoming Publication)*	Digital Authoritarian. In the Encyclopedia of Political Communication	Edited by Alessandro Nai (University of Amsterdam) and Dominique Wirz (University of Fribourg). Accepted,

			published by Edward Elgar Publishers, London
2024	*Book Chapter (Upcoming Publication)*	Digital Journalism: Theory, Practice and Critics.	In Book: Evolving Journalism Research Methods: Application, Trends, Analysis by Michael Boyle & Adam Rainear (Eds). London: The Routledge Companion to Journalism Research Methods

Dewan Editor & Reviewer Jurnal Nasional dan Internasional

1. Editorial Board, Communication Theory (Scopus Q-1), a flagship journal of the International Communication Association (ICA), Oxford Academic.
   Link: https://academic.oup.com/ct/pages/Editorial_Board
2. Editorial Board, *Journal of Creative Industry and Sustainable Culture*, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia (2022-skrg).
   Link: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jcisc/about/editorialTeam
3. Editorial Board of *Asian Journal of Media and Communication (AJMC),* Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia (2021-skrg).
   Link: https://journal.uii.ac.id/AJMC/about/editorialTeam
4. Editorial Board of Jurnal Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi, FPSB, Universitas Islam Indonesia (SINTA 2).
   Link: https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/about/editorialTeam
5. Reviewer artikel pada beberapa jurnal internasional bereputasi (terindeks SCOPUS) sejak 2020-skrg: Asian Journal of Communication (Q1), Media History (Q2), Jurnal Komunikasi Malaysia (Q3), International Journal of Media and Cultural Politics (Q3), Jurnal Sosial Politik Universitas Gadjah Mada (Q3), Studies in Media and Communication (Q4), Critical Studies in Media Communication (Q2), Pertanika Social Science (Q2), International Communication Gazette (Q1), Media Asia (Q2).
6. Reviewer pada Palgrave Macmillan Book Publisher (PSB/PSM), London, UK.

Keanggotaan Asosiasi Komunikasi Internasional

1. Public Service Media Policy (Kelompok Kerja*, International Association of Media and Communication Research, IAMCR*), 2014-skrg, kantor pusat di Praha, Cheko. (Juga menjadi anggota aktif IAMCR sejak 2016-sekarang)
2. International Communication Association (ICA), sejak 2017-sekarang.
3. RIPEat.org, kolaborasi global akademisi dan profesional media penyiaran publik se-dunia, berbasis di Swedia, 2014-sekarang.
4. Jaringan global peneliti *Safety of Journalists*, berpusat di London, UK (2023-sekarang): Link: https://safetyofjournalists.org/academic-experts/masduki

Keanggotaan Asosiasi Profesi Komunikasi Nasional

1. Ketua Bidang Media dan Publikasi, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) periode 2014-2016.
2. Ketua Bidang Penelitian, Pengurus Pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) periode 2019-2022.
3. Pengurus Pusat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2024-2027
4. Dewan Kehormatan, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) DIY, 2024-2028

Penghargaan Nasional dan Internasional

1. Meraih ***Urban Communication Research Grant, 2020*** dari IAMCR, Oregon, Amerika Serikat, dengan riset berjudul: From Street Art to Social Media: In Search of Alternative Public Service Media for Urban Javanese in the City of Yogyakarta, Indonesia. Laman: https://iamcr.org/ucf-iamcr-research-grant/2020award.
2. ***2020 Hackathon Digital Humanities 1st Award*** of Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia-Kedutaan Belanda, Jakarta (karya prototype museum virtual telusur kasus pembunuhan jurnalis Fuad Muhammad Syafrudin di Yogyakarta).
3. ***Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPPLN)*** Kemenristekdikti, tahun 2015-2019 untuk studi lanjut S-3 di University of Munich, Jerman.
4. ***Beasiswa Konrad Adenauer Stiftung (KAS)*** tahun 2003-2004 untuk studi lanjut master in journalism di Ateneo de Manila University, Filipina.
5. ***Fellowship,*** research and workshop on "Legal Clinic in Higher Education on Freedom of Information (FOI)", 2010 in Buenos Aires, Argentina. Funded by Open Society Institute.

6. ***SEAPA Journalism Award 2009,*** Human Right and Democracy Under the New ASEAN Charter (Beasiswa liputan jurnalistik di Thailand Selatan dan sekitarnya)
7. ***Asia Media Forum Fellowship Award 2009***, for research on Impunity, Violence and Freedom of Expression and Press during Thailand political crisis.
8. Terpilih sebagai **Academic Leader 2** bidang Ilmu Sosial Humaniora, pada Anugerah Academic Leader tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah V, tingkat Provinsi DIY.

Konferensi Nasional dan Internasional (3 Tahun Terakhir)

Speaker, 'Mapping Digital Violence Against Women Journalists in Indonesia', UNESCO World Press Freedom Day Academic Conference 2022, Punta Del Este, Uruguay, 03 May 2022

Invited Speaker, 'Between Visual Ethnography and Journalism: Concept and Case Study', International Summer Course Germany-Indonesia, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, 14-16 September 2022.

Invited Panel Speaker, 'How to Reclaim Public Trust in the Media?' Trusted Media Summit, APAC 2022, Denpasar Bali, 20-21 September 2022, AJI Indonesia, Data Leads dan Google News Initiative (GNI).

Speaker and Session Chair, 'The COVID-19 Pandemic and Indonesian Journalistic Culture: Changes and Implications', 11th ACAS International Conference, Ateneo de Manila University, Manila, Philippines, 17-18 November 2022.

Speaker, 'Mapping Disinformation Ecosystem in Indonesian Digital Politics', ECREA Political Communication Conference, 31 August-1 September 2023, Weizenbaum Institute for the Networked Society, Berlin, Germany.

Invited Panel Speaker, 'Journalism and the Indonesian Worldview: Between Westernism, Developmentalism and Islamic Values', 2nd International Conference on Islamic and Social Science, Hotel Grand Rohan Yogyakarta, Faculty of Psychology and Social Cultural Sciences, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 8-9 September 2023.

Invited Panel Speaker, 'Sexual Harassment to Women Journalist in Indonesia:

Context and Policy Issues', International Workshop on Solidarity for Media Freedom for Women Journalist, Asian Center for Journalism (ACFJ) dan Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Oktober 2023.

Invited Speaker, by USAID-Indonesia, Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta: *Media Ownership and Political Affiliation in Indonesia*, Jakarta, 14 Desember 2023.

Invited Speaker, Focus Grup Diskusi dengan para pakar dan praktisi media massa nasional terkait Pengembangan Kebijakan dan Penyusunan Rencana Strategis Dewan Pers, periode 2025-2029, Jakarta, 2 Februari 2024.

Speaker, Kuliah Umum/Studium Generale: Dinamika Perkembangan Teori dan Praktik Komunikasi di Asia, diselenggarakan Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 16 Maret 2024.

Closing Speech, Indonesian Fact-Checking Summit, 2 May 2024, Palembang, Sumatera Selatan. *Kemunduran Demokrasi di era Platformisasi Jurnalistik*. Diselenggarakan oleh Google News Initiative dan AJI Indonesia.

Speaker, program pengabdian masyarakat internasional 'Cerdas Menulis Opini di Media', bagi buruh migran Indonesia (BMI), Kedutaan Besar Singapura, 11-12 Mei 2024.

Speaker, International Interdisciplinary Scientific Conference: Digital Horizons 2024: Innovation, Ethics, Dialogue in a Connected World (hybrid): *news media transformation in Southeast Asia*, Bratislava University of Economic, Slovak.

Invited Speaker, Sekolah Islam dan Demokrasi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin: Islam: *Merawat Keindonesiaan dan Demokrasi*, 29-30 Mei 2024.

Panel Speaker, Forum Publik Nasional LETSS TALK: Kebebasan Berekspresi Jangan Diopresi: Mengapa Kita Harus Menolak RUU Penyiaran? LETSS TALK dan Konde.co, Jakarta, *hybrid conference,* 15 Juni 2024.

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Masduki

PONDOK PESANTREN
"AL - FALAH"
1395 H

PONDOK PESANTREN
Al-Falah

LANDASAN ULIN – BANJARBARU
KALIMANTAN SELATAN – INDONESIA
https://alfalahbjb.id

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
SERAH TERIMA SURAT KEPUTUSAN
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK PROFESO
Masduki, S.Ag., M.S

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية الإندونيسية

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA